

LAPORAN INTERIM TRIWULAN 1 Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Pelaksana Harian Kepala Balai Besar POM di Bandung

**“Balai Besar
Pengawas Obat dan
Makanan di
Bandung selaku Unit
Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan
POM RI senantiasa
selalu berkomitmen
menjamin mutu
Obat dan Makanan
yang beredar di
masyarakat”**

P

Uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 dapat diselesaikan. Tahun 2023, merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024. Pada tahun 2023, terjadi beberapa isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Bandung. Namun, hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka “menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat”.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan triwulan I tahun 2023 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Interim Triwulan I Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM.

LAPKIN Interim Triwulan I Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 disusun pada akhir triwulan I pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Bandung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung.

Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.



Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan POM serta Balai Besar POM di Bandung di triwulan berikutnya.

Bandung, 20 April 2023

Plh. Kepala Balai Besar POM di Bandung,



Dwi Kurniasari, S.Si., Apt



DAFTAR ISI

Sambutan	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	v

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi	4
1.3 Aspek Strategis Organisasi	4
1.4 Analisis Lingkungan Strategis	5
1.5 Isu Strategis	9

Bab 2 Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis	27
2.2 Sasaran Kegiatan	30
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator	40

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	42
3.1.1 Sasaran Kegiatan Ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	46
3.1.2 Sasaran Kegiatan Ke-2: Meningkatnya Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	55
3.1.3 Sasaran Kegiatan Ke-3: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	59
3.1.4 Sasaran Kegiatan Ke-4: Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	60
3.1.5 Sasaran Kegiatan Ke-5: Meningkatnya efektivitas Pemeriksaan Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung	63
3.1.6 Sasaran Kegiatan Ke-6: Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	69
3.1.7 Sasaran Kegiatan Ke-7: Meningkatnya Pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Bandung yang optimal.....	75
3.1.8 Sasaran Kegiatan Ke-8: Meningkatnya Efektivitas Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	77
3.1.9 Sasaran Kegiatan Ke-9: Terwujudnya Organisasi BBPOM di Bandung yang Efektif	81
3.1.10 Sasaran Kegiatan Ke-10: Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang Berkinerja Optimal	84



3.1.11 Sasaran KegiatanKe-11: Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK BBPOM di Bandung yang Terintegrasi dan Adaptif	85
3.1.12 Sasaran KegiatanKe-12: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	85
3.2 Realisasi Anggaran	87
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan	90

Bab 4 Penutup

4.1 Kesimpulan	94
4.2 Saran	96



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama triwulan I tahun 2023. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama triwulan I tahun 2023 yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan. 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu. 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

SASARAN KEGIATAN

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
6. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
7. Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
8. Terwujudnya organisasi BBPOM di Bandung yang efektif
9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 dan



Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023, telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Bandung yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2022. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2023. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung”** diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori memenuhi ekspektasi sebanyak 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 101,80% dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 101,21%. Dua indikator berkriteria belum memenuhi ekspektasi Persentase Obat yang memenuhi syarat (98,55%) dan Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 95,24%. 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori tidak dapat disimpulkan yaitu Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 128,12%.

Sasaran kegiatan kedua yaitu **“Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan”** dengan capaian indikator kegiatan Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT belum dapat disimpulkan terkait pengukuran indeks dilakukan pada akhir tahun.

Sasaran kegiatan ketiga yaitu **“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT”** dengan indikator kegiatan Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandung, belum dapat diukur capaiannya karena realisasi baru dapat dihitung pada akhir tahun.

Sasaran kegiatan keempat yaitu **“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung”** dengan 3 (tiga) indikator kegiatan, yaitu Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, ketiganya belum dapat diukur capaiannya karena realisasi baru dapat dihitung pada akhir tahun.

Sasaran kegiatan kelima yaitu **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung”** diperoleh capaian 5 (lima) indikator kinerja dengan kategori memenuhi kriteria, yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 100,62%, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 113,78%, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 106,38%, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 100,57%, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 108,42%. Satu Indikator Tidak memenuhi ekspektasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik. Satu indikator yang dapat diukur capaiannya karena realisasi baru dapat dihitung pada akhir tahun yaitu Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran kegiatan keenam yaitu **“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan”** dengan semua indikator kegiatan (4 IKU) memenuhi ekspektasi, yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandung (100,15%), Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman sebesar 100%, Jumlah desa pangan aman sebesar 100%, dan Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya sebesar 100%



Sasaran kegiatan ketujuh yaitu **“Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung”** diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori belum memenuhi ekspektasi, yaitu Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 98,93%.

Sasaran kegiatan kedelapan yaitu **“Terwujudnya organisasi BBPOM di Bandung yang efektif”** dengan 2 (dua) indikator kegiatan, yaitu Indeks RB BBPOM di Bandung dan Nilai AKIP BBPOM di Bandung belum dapat diukur capaiannya karena realisasi baru dapat dihitung pada akhir tahun.

Sasaran kegiatan kesembilan yaitu **“Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal”** dengan indikator kegiatan Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung belum dapat diukur capaiannya karena realisasi baru dapat dihitung pada akhir tahun.

Sasaran kegiatan kesepuluh yaitu **“Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”** diperoleh capaian 2 (dua) indikator kinerja dengan 1 (satu) kategori memenuhi ekspektasi yaitu 102,86% sedangkan IKU Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum dapat diukur capaiannya karena realisasi baru dapat dihitung pada akhir tahun.

Sasaran kegiatan kesebelas yaitu **“Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel”** diperoleh capaian untuk 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori tidak dapat disimpulkan, yaitu Nilai Kinerja Anggaran UPT 145,14 %.

Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandung memperoleh anggaran sebesar Rp 75.260.350.000,- Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 dengan presentase 15,56% yaitu sebesar Rp. 11.714.438.459,-. Dari sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan diperoleh tingkat efisiensi tertinggi, yaitu terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung dan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung. Sedangkan tingkat efisiensi terendah adalah pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung.

Kegiatan BBPOM di Bandung yang dilakukan selama triwulan I tahun 2023 telah dilaksanakan dengan cukup efisien. Meskipun demikian pada triwulan berikutnya di tahun 2023 akan terus ditingkatkan sesuai dengan pedoman Renstra Balai Besar POM tahun 2020-2024.



LAPORAN INTERIM TRIWULAN 1 TAHUN 2023

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- 1.3 STRUKTUR ORGANISASI
- 1.4 ISU STRATEGIS

1.1 LATAR BELAKANG

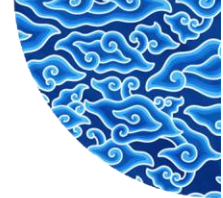
Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung bulan Januari s.d. Maret atau Triwulan I Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama triwulan IV Tahun 2021 dan tahun kedua dari Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja Interim ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Bandung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.





Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM sebanyak 21 (dua puluh satu); b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 13 (tiga belas); dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM sebanyak 39 (tiga puluh sembilan).

KEDUDUKAN

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

TABEL 1.1
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

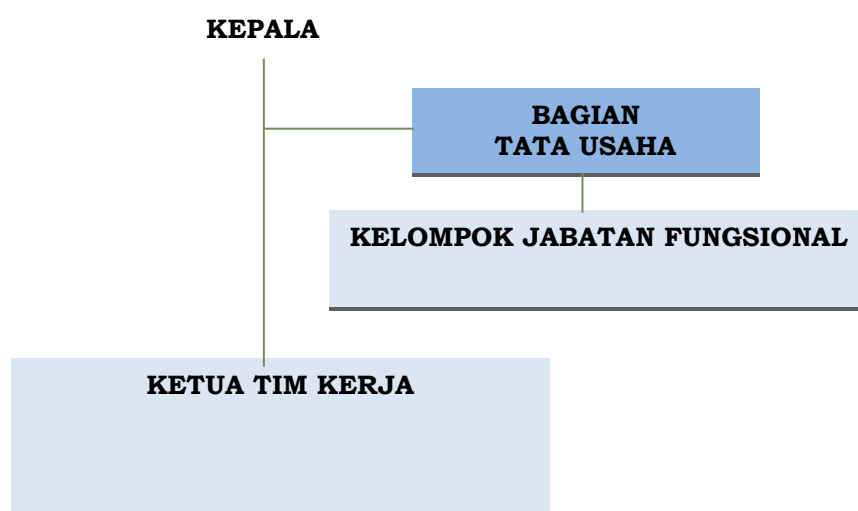
UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
BBPOM di Bandung	Alamat Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung	1. Kota Bandung 2. Kabupaten Subang 3. Kabupaten Cianjur 4. Kabupaten Garut 5. Kabupaten Bandung Barat 6. Kabupaten Majalengka 7. Kabupaten Sumedang 8. Kabupaten Bandung 9. Kabupaten Karawang 10. Kota Bekasi 11. Kabupaten Bekasi 12. Kabupaten Sukabumi

UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
		13. Kota Cimahi 14. Kota Sukabumi 15. Kabupaten Purwakarta 16. Kabupaten Cirebon 17. Kota Cirebon, 18. Kabupaten Indramayu 19. Kabupaten Kuningan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 7 September 2020.

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BBPOM DI BANDUNG



1.4 ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2023 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

ISU INTERNAL

Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumberdaya Manusia

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional.

Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 5.686 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area

perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana adalah 78,1% yang terdiri dari pemenuhan alat laboratorium 61,7% dan pemenuhan sarana prasarana kerja 94,6%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk penambahan alat laboratorium.

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Bandung, masih terdapat gap sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2023, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 62,4%.

Regionalisasi Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2023 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 'Regionalisasi Laboratorium'. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam tujuh region. Balai Besar POM di Bandung masuk ke dalam Region 3 dengan Koordinator BBPOM di DKI Jakarta, dan anggota terdiri dari BBPOM di Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Serang. Manfaat dari system manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.



ISU EKSTERNAL

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut :

Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (IV) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Sebagaimana tertuang dalam PP no.72 Tahun 2012 tersebut, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market* Obat dan Makanan sehingga dapat menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai Besar POM di Bandung, yaitu melalui :

- a) Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar mulai dari pengawasan, pelaksanaan regulasi, pembinaan, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, serta;
- b) Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan.

Fokus sistem kesehatan nasional tahun 2021 dengan berkaca pada terjadinya Pandemi covid-19 menurut Bappenas akan menjadi salah satu *major project* dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Adapun fokus penguatan Sistem Kesehatan Nasional di 2021 antara lain penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), penguatan ketahanan kesehatan dan penguatan sumber daya melalui pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan. Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM memegang peranan penting di ketiga fokus penguatan ini, diantaranya dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) untuk mengkampanyekan GERMAS pada masyarakat, memperkuat sistem pengawasan dengan penguatan kapasitas dan jejaring laboratorium serta pengawalan dalam pemenuhan vaksin dan obat, termasuk vaksin covid-19.



Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Balai Besar POM di Bandung akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar. Seiring dengan penerapan JKN, akan banyak industri farmasi yang harus melakukan resertifikasi CPOB yang berlaku 5 (lima) tahun. Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPOM harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri.



Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2023 terdapat 85 industri farmasi, 43 industri Obat Tradisional, 103 industri kosmetik, 44 industri suplemen makanan, 60 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 609 Industri Pangan dan 23.774 Industri Rumah Tangga Pangan. Hal tersebut merupakan potensi bagi Balai Besar POM di Bandung dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha.

Pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi peluang bagi Balai Besar POM di Bandung untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung, sampai dengan tahun 2014 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 76,97%. Sedangkan pemenuhan SDM sesuai beban kerja tahun 2015 berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 hanya sebesar 44,48 %. Jumlah SDM yang tidak sebanding ini menjadi tantangan yang sangat besar dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal ini, Balai Besar POM di Bandung harus menyusun strategi agar kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana secara optimal, dan juga menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, Balai Besar POM di Bandung memiliki kelebihan yang dapat dipergunakan, yaitu adanya pedoman pengawasan yang jelas sebagai acuan dan standar baku dalam pengawasan atas Obat dan Makanan. Selain itu, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015, SNI ISO/IEC 17025: 2017 dan SNI ISO 37001:2016

Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.



Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023, salah satu misinya memiliki tujuan meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Hal ini merupakan tindak lanjut pemerintah daerah dalam mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) di sektor kesehatan yaitu diantaranya mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya. Untuk mencapai target tersebut pasti akan diimbangi dengan peningkatan jenis dan jumlah obat terkait penyakit-penyakit tersebut, dan ini semakin nyata dengan terjadinya Pandemi covid-19 sejak 2020 yang lalu.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Balai Besar POM di Bandung dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai Besar POM di Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kemajuan dari ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro-ekonomi, yakni pendapatan per kapita. Pada tahun 2018 PDRB per kapita atas harga berlaku Provinsi Jawa Barat sebesar 40,30 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,18 juta atau naik sebesar 8,41 persen. Persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2017 (7,86%) menjadi tahun 2018 (7,27%).

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Faktor tersebut dapat menyebabkan kecenderungan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan



tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menimbulkan penurunan derajat kesehatan.

Pada tahun 2020, penduduk Jawa Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yaitu sebanyak 48,27 juta jiwa, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dalam hal jumlah penduduk terbesar. Terdiri atas laki-laki sebanyak 24,51 juta jiwa dan perempuan sebanyak 23,76 juta jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik - Jawa Barat dalam Angka 2020), menjadi tantangan bagi BBPOM di Bandung dalam perannya memberikan informasi dan edukasi publik mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

Tuntutan masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen serta media informasi baik offline maupun online yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Bandung berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

Disisi lain, pengakuan stakeholder akan keberadaan Balai Besar POM di Bandung semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena Balai Besar POM di Bandung



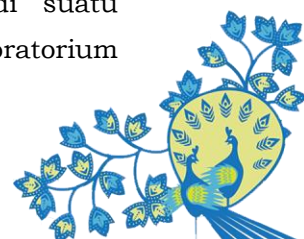
tidak hanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal tetapi juga berperan aktif didalam berbagai forum instansi lainnya dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa diantaranya adalah Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional di dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Program Pasar Aman dsari Bahan Berbahaya, Program Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan sebagai narasumber dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Balai Besar POM di Bandung juga melayani pengujian produk Obat dan Makanan dari pihak ketiga. Secara umum, pengujian dari pihak ketiga berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat umum, antara lain kepolisian dan pelaku usaha. Hal tersebut menjadi peluang, khususnya bagi Laboratorium Balai Besar POM di Bandung dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder sekaligus mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Balai Besar POM di Bandung untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di Bandung untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Bandung terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis laboratorium. Laboratorium merupakan tulang punggung dari pengawasan Obat dan Makanan, oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana laboratorium yang lengkap mulai dari metode analisa, baku pembanding, reagensia sampai kepada peralatan yang memadai. Peralatan yang dimiliki masih belum memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Adalah fakta bahwa kemampuan dan kapasitas uji laboratorium Badan POM, termasuk Balai Besar POM di Bandung, belum memadai jika dibandingkan dengan beban kerja pengawasan Obat dan Makanan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu juga terkait erat dengan perkembangan teknologi di bidang pengujian, sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri untuk laboratorium Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium



dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada terkait dengan produk dan metode analisis.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015– 2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS).

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

Jejaring Kerja

Balai Besar POM di Bandung menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Balai Besar POM di Bandung mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka



Balai Besar POM di Bandung sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), *Indonesia Criminal Justice System* (ICJS), dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan *ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed* (ARASFF), *World Health Organization* (WHO), *Codex Alimentarius Commission*, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), *ASEAN References Laboratories* (AFL), *Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme* (PIC/S), dan *International Crime Police Organization Interpol*.

Balai Besar POM di Bandung melakukan pengembangan dan penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui Food Safety Masuk Desa, PJAS, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selain itu, dilakukan pengembangan jejaring komunikasi melalui peningkatan komunikasi sosial melalui kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) bersama tokoh masyarakat serta Iklan Layanan Masyarakat.

Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Transisi Pandemi Covid-19 ke Endemik

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi, termasuk Provinsi Jawa Barat. Setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakhiri pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan Juni 2020 dan mulai menerapkan tatanan new normal, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Jawa Barat alami peningkatan yang cukup tajam. Selama masa pandemik tersebut menjadi tantangan besar bagi BBPOM di Bandung dapat turut berkontribusi dalam percepatan penanganan covid-19 dan menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan dalam masa pandemik-Covid-19 dengan membuat berbagai inovasi seperti layanan publik berbasis digital.



Namun pada awal tahun 2022, banyaknya tren indikator pengendalian pandemi yang terus menunjukkan ke hal yang positif, sehingga Indonesia sudah mulai bersiap-siap membuat langkah menuju ke arah endemik. Di sis lain pada tanggal 30 Desember 2022 kebijakan PPKM di Indonesia Resmi Dicabut oleh presiden yang mengarah kepada transisi pandemik menuju ke arah endemik dengan sejumlah indikator, antara lain laju penularan harus kurang dari 1, angka positivity rate harus kurang dari 5%, kemudian tingkat perawatan rumah sakit harus kurang dari 5%, angka fatality rate harus kurang dari 3%, dan level PPKM berada pada transmisi lokal level tingkat 1. Kondisi – kondisi ini harus terjadi dalam rentang waktu tertentu misalnya 6 bulan. Proses transisi itu sejalan dengan kebijakan pelonggaran-pelonggaran yang diputuskan pemerintah. Pelonggaran tersebut dilakukan antara lain dengan menurunkan level PPKM menjadi level 2, menghapuskan antigen dan PCR sebagai syarat melakukan perjalanan domestik menggunakan transportasi laut, darat maupun udara bagi masyarakat yang sudah vaksin hingga dosis ke-2. Dengan adanya transisi endemik, tugas pengawasan Obat dan Makanan akan lebih optimal, namun inovasi yang telah dibuat harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan, banyak respon positif dari lintas sektor dan masyarakat terhadap inovasi khususnya layanan publik berbasis digital yang telah dilakukan di masa pandemik Covid 19. Hal ini, menjadi peluang sekaligus tantangan bagi BBPOM di Bandung untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan.



LAPORAN INTERIM TRIWULAN 1 TAHUN 2023

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
- 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022
- 2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022
- 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022
- 2.5 METODE PENGUKURAN

2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana strategis BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan



LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN
2023

adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung perlu melakukan reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024. Selain itu, telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis tersebut. Berdasarkan hasil reviu ***Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024***, karena tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM. Visi, Misi dan Tujuan BPOM masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Visi 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

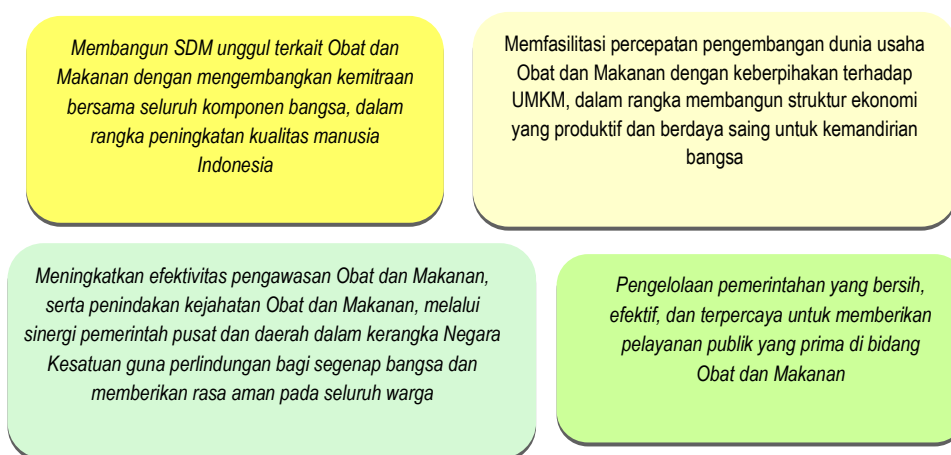
- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Balai Besar POM di Bandung sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara *full spectrum* pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan i

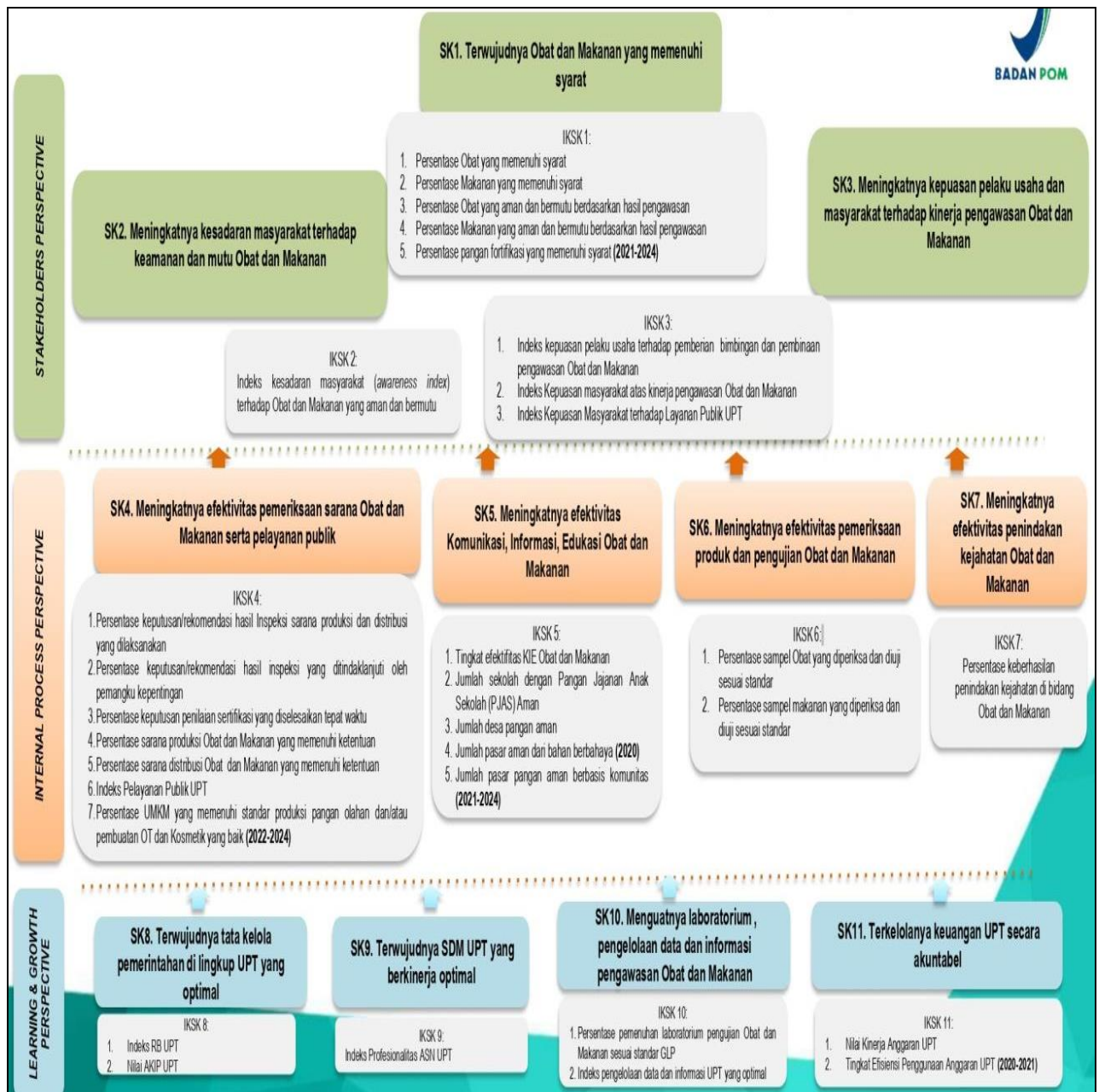
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Bandung sebagai berikut:



Gambar 2.1 Misi Balai Besar POM di Bandung 2020-2024

SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Bandung dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Bandung akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai Besar POM di Bandung yang berdasarkan hasil reviu dirubah menjadu sebagai berikut



Gambar 2.2 Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Bandung

Sumber: Konsensus BPOM

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN
2023

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan revidi, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Perubahan
Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPOM di Bandung
Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	97	97,5	98	98,5
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	80	82	84	86
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94	95	95,5	96	94
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	70	72	74	76
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat						70	72	74	76
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83	71	74	77	80
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89	91,1	92,3	93,4	94,6
8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	77,83	80,22	82,62	85,01
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92	89,50	90,50	91,00	92,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	96	97	98	99
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	63,9	70,9	78	85	64	71	78	85

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN
2023

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	88	91	94	97
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	57	61	66	70
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82	74	76	78	80
15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar						-	77	79	81
SK5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83	92	93.8	95.7	97.6
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104	42	76	112	150
19. Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47	19	28	37	47
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	8	13	18	23	8	13	18	23
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	100	100	100	100
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90	100	100	100	100
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90	65	67	69	71
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal									
24. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95	82.8	83.8	84.8	85.8
25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92	83	85.5	88	90.5
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal									
26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85	79	80	81	82
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan									
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90	79	84	89	94
28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	2	2.25	2.5	3
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel									
29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97	95.1	95.3	95.6	95.9
30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (95%)	-	-	-

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2023 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor PR.04.12A.12A5.07.22.106 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Bandung
Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	98
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	84
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	96
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	78
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	78
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78	78
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	93.4
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77	82.62
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	91	91.00
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	98
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil	70.9	78

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN
2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BBPOM di Bandung	inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	94
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	66
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	78
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,81	4,40
		16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	-	95,70
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	77	95.7
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62	112
		19. Jumlah desa pangan aman	28	37
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13	18
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	88	100
		22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	70
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	93	84.8
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	90	88
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	80	81
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81	89
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2,26	2.80
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95	95.60
		30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	-

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

Disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan RKT Tahun 2023 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 75.260.350.000,-

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja BBPOM di Bandung
Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	98
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	78
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	82.62
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	91.00
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN
2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(5)
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4,40
		16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	95,70
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.7
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112
		19. Jumlah desa pangan aman	37
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	84.8
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	88
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	81
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.80
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.60
		30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	-

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Anggaran (Menjadi)

Rp.75.260.350.000,-



2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2023

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Bandung beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Tahun 2023

Sasaran Strategis	RK	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%)												Anggaran
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	532.995.540
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	144.966.250
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	274.573.460
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78.058.750
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	28.810.000
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	78,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	78,00	358.797.000
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	93,40	557.089.000



LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN
2023

Sasaran Strategis	RK	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%)												Anggaran
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	82,62	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	82,62	761.590.00
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	91,00	459.238.500
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	181.360.000
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	205.782.000
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	459.238.500
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	844.339.000
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	1.128.940.000
	15	Indeks Pelayanan Publik	4,40	-	-	-	-	-	-	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	119.100.000
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	10,00	15,00	20,00	30,00	40,00	50,00	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00	79,00	130.548.000
	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,70	-	-	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	23.136.986.000
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112,00	0,00	10,00	20,00	30,00	30,00	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00	112,00	1.005.602.000,00
	19	Jumlah desa pangan aman	37,00	0,00	10,00	15,00	20,00	40,00	45,00	60,00	75,00	85,00	90,00	95,00	37,00	1.149.720.000
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	3,00	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	348.351.000
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	3,00	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	839.020.000
	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	8,00	15,00	22,00	28,00	32,00	38,00	44,00	49,00	56,00	62,00	66,00	100,00	654.232.000
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00	8,00	15,00	22,00	28,00	32,00	38,00	44,00	49,00	56,00	62,00	66,00	70,00	1.259.188.000
Terwujudnya tatakelola pemerintahan	24	Indeks RB UPT	84,80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	84,80	4.570.325.000

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN
2023

Sasaran Strategis	RK	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%)												Anggaran
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
UPT yang optimal	25	Nilai AKIP UPT	88,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	88,00	367.522.000
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	81,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	81,00	24.954.377.000
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	89,00	8.811.085.000
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,80	-	-	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	300.400.000
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95,60	0,00	25,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,60	1.598.116.000

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja dan dilaporkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM, dengan rincian sebagai berikut

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5
KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

			
Tidak Dapat Disimpulkan	Memenuhi Ekspektasi	Belum Memenuhi Ekspektasi	Tidak Memenuhi Ekspektasi
$X > 120\%$	$100\% \leq x \leq 120\%$	$80\% \leq x < 100\%$	$x < 80\%$
-	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif

B. REALISASI ANGGARAN

- Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran
- Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan.
- Evaluasi dan Analisis Anggaran berisikan mengenai rencana dan realisasi penyerapan pendanaan per program/ kegiatan pada tahun yang bersangkutan baik yang berasal dari DIPA maupun Hibah dan analisis tingkat pencapaiannya.
- Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut

TABEL 2.6
KRITERIA TINGKAT EFISIENSI

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

LAPORAN INTERIM TRIWULAN 1 TAHUN 2023

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.2 REALISASI ANGGARAN

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandung tahun 2023 memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung pada triwulan I tahun 2023 secara lengkap adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2023

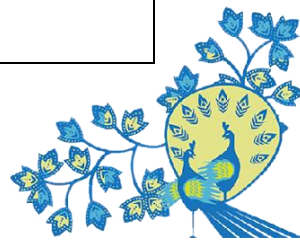
SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	
1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	105,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	
2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	96,63	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	
5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	100,03	MEMENUHI EKSPEKTASI	
6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	91,33	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	
7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	98,93	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	
8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	102,86	MEMENUHI EKSPEKTASI	
11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	145,14	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	



Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 29 indikator kinerja utama. Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

TABEL 3.2
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN I TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023 (%) Kecuali*	TARGET TW I (%)	REALISASI TW I (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I (%)	KRITERIA CAPAIAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	98,00	98,00	96,58	98,55	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	80,00	95,24	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	96,00	97,73	101,80	MEMENUHI EKSPEKTASI
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,95	101,21	MEMENUHI EKSPEKTASI
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	78,00	78,00	100,00	128,21	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				105,00%	MEMENUHI EKSPEKTASI
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78,00	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan	93,40	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023 (%) Kecuali*	TARGET TW I (%)	REALISASI TW I (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I (%)	KRITERIA CAPAIAN
	Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Makanan					
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	82,62	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	91,00	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	98,00	98,00	98,60	100,62	MEMENUHI EKSPEKTASI
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78,00	88,75	113,78	MEMENUHI EKSPEKTASI
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	94,00	100,00	106,38	MEMENUHI EKSPEKTASI
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	66,38	100,57	MEMENUHI EKSPEKTASI
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	78,00	84,57	108,42	MEMENUHI EKSPEKTASI
		15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4,40*	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023 (%) Kecuali*	TARGET TW I (%)	REALISASI TW I (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I (%)	KRITERIA CAPAIAN
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	20,00	10,00	50,00	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				96.63%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,70	95,70	95,84	100,15	MEMENUHI EKSPEKTASI
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	112,00	20,00	20,00	100,00	MEMENUHI EKSPEKTASI
		19. Jumlah desa pangan aman	37,00*	15,00	20,00	100,00	MEMENUHI EKSPEKTASI
		20. Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	100,00	20,00	20,00	100,00	MEMENUHI EKSPEKTASI
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				100,03%	MEMENUHI EKSPEKTASI
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	20,00	17,21	86,05	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
		22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	70,00	22,00	21,25	96,61	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				91,33%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
7.	Meningkatnya keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	21,76	98,93	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				98,93%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	84,80	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN

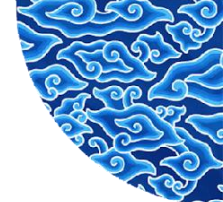


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023 (%) Kecuali*	TARGET TW I (%)	REALISASI TW I (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I (%)	KRITERIA CAPAIAN
	BBPOM di Bandung yang optimal	25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	88,00	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	81.00	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2,80*	2.80	2,8800	102,86	MEMENUHI EKSPEKTASI
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				102,86%	MEMENUHI EKSPEKTASI
11.	Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95,6	50.00	72,57	145,14	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				145,14%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Pada triwulan I tahun 2023, terdapat dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI, empat (4) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, satu (1) pencapaian sasaran kegiatan tidak dapat disimpulkan, serta empat (4) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada akhir tahun. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Bandung pada triwulan I Tahun 2023 berdasarkan Perspective Balance Score Card memiliki Nilai Kinerja Stakeholder Perspective (35); Nilai Kinerja Internal Process Perspective (**96,73**) dan Nilai Kinerja Learning and Growth Perspective (62), secara rinci sebagaimana tabel 3.3 berikut:





TABEL 3.3
NILAI KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN
PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD
TRIWULAN I TAHUN 2023

PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN N SASARAN	NILAI PENCAPAIAN PERSPECTIV E
<i>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</i>	1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	105	35
	2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	
	3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>	4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	96,63	96,73
	5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	100,03	
	6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	91,33	
	7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	98,93	
<i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>	8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	-	62
	9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	-	
	10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	102,86	
	11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	145,14	
NILAI KINERJA ORGANISASI			64,57

Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja di bawah ini

**SASARAN
KEGIATAN
KE-1**

**TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG
MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI
BANDUNG**



Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 (lima) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **98,10%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4.

TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98,00%	96,58	98,55	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84,00%	80,00	95,24	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	
3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	96,00%	97,73	101,80	MEMENUHI EKSPEKTASI	
4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	78,00%	78,95	101,21	MEMENUHI EKSPEKTASI	
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	78,00%	100,00	128,21	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			98.10%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2023 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2023. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 2022. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan

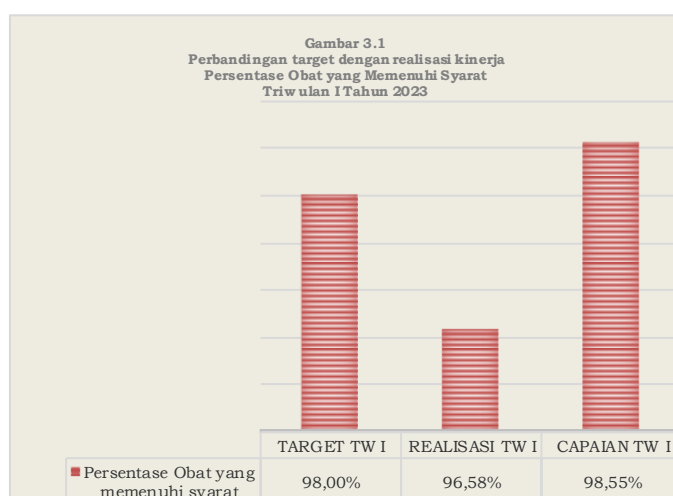


berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98.00%	96.58%	98.55%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



Pada triwulan I tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 98,00%. Sebanyak 263 sampel acak telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 254 sampel memenuhi syarat, 9 sampel tidak memenuhi syarat. Persentase Obat yang memenuhi syarat

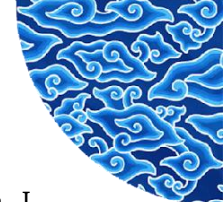
sebesar 96.58%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **98.55%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 98,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 98.55%.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN





Ketidakberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2023 disebabkan antara lain:

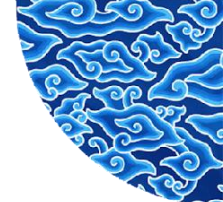
- Sampai Triwulan I hasil pengujian Obat yang TMS sebanyak 9 sampel yaitu TMK Penandaan sampel obat tradisional sebanyak 1 sampel dan 9 sampel TMS mutu pengujian dengan parameter uji kimia (kadar air pada sampel obat tradisional, suplemen kesehatan dan uji disolusi pada sampel obat) serta parameter uji mikrobiologi (angka kapang khamir serta angka lempeng total) pada sampel tradisional.
- Kepatuhan produsen Obat terhadap pedoman yang telah ditetapkan masih kurang. Hal ini terlihat dari hasil pengujian untuk sampel Obat masih banyaknya sampel yang TMS hasil pengujian, baik parameter uji kimia maupun parameter uji mikrobiologi.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat, Dana Alokasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, Narasumber dan pengawasan bersama.
- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat, *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram dan twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat bekerjasama dengan radio. Melaksanakan KIE Bersama lintas sektor (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat).
- Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana pelayanan kefarmasian, pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, masyarakat tentang Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pembinaan juga dilakukan saat pengawasan rutin di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan memberikan informasi mengenai cek klik.

Penerapan sanksi pidana terhadap penanggungjawab di sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan kosmetik Tanpa Ijin Edar/ tidak memenuhi standar yang dilarang beredar. Pengawasan terhadap produk Obat yang beredar selalu dilakukan melalui kegiatan Operasi Penindakan yang sudah direncanakan sesuai tingkat prioritasnya. Pada triwulan I, dilakukan operasi penindakan terhadap salah satu sarana produsen kosmetik Tanpa Ijin Edar/ tidak memenuhi standar di Kabupaten Bekasi dalam rangka pemberian sanksi pidana. Selain itu, tetap dilakukan pengawasan melalui patroli siber terkait produksi/distribusikan Obat dan Makanan Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar secara rutin.





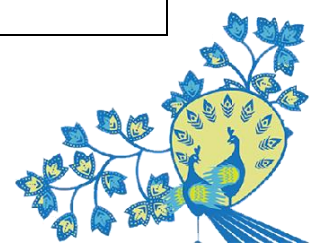
D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang ketidakberhasilan pencapaian kinerja :
 Sampling sampel kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung mulai dilakukan pertengahan bulan Februari 2023. Sehingga menyebabkan masih sedikitnya sampel selesai uji sampai dengan triwulan I tahun 2023.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
a	Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus penandaan obat tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional, pemenuhan CPKB dan CDOB. Dengan kondisi pandemi yang sudah menurun dengan tetap menjaga proses pencapaian target produksi selama triwulan IV dapat dioptimalkan dengan pemeriksaan secara luring	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan secara luring dan daring sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	-	-
b	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan, diantaranya dengan pemantauan rutin CAPA yang masuk dan yang telah dievaluasi.	Dilakukan monitoring dan evaluasi CAPA yang masuk dan dilaporkan secara berkala. Telah dilakukan bimtek dan desk CAPA tanggal 26 Agustus 2022 untuk sarana puskesmas	-	-
c	Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberian layanan informasi tentang Obat secara daring maupun tatap muka.	-	Melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat, pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka	Desember 2023
d	Peningkatan kegiatan sosialisasi (KIE) tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM. KIE tentang obat juga dilakukan melalui Media Sosial serta KIE yang dilaksanakan melalui Webinar Warta POPA yang dilaksanakan setiap bulan.	-	-	-



Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
e	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.	1. Dilakukan FGD Upaya Pengendalian Peredaran Psikotropika di Jawa Barat Tanggal 14 Desember 2022 2. Dilakukan FGD Sarasehan bersama lintas sektor dengan tema Penggalan Informasi Empiris bahan alam berdasarkan Kearifan Lokal tanggal 13 Desember 2022 3. Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian tanggal 15 Desember 2022	Melakukan monev tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang disampaikan kepada instansi terkait	Desember 2023
f	Pro justicia memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang. Secara formal sanksi administrative pro justicia menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembinaan dan penyebaran informasi mengenai penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar dilakukan melalui tatap muka maupun daring menggunakan Media sosial dan media elektronik.	-	-	-

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. PRESENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

Sampel acak yang telah disampling sampai Triwulan I adalah sebanyak 158 sampel. Terdapat pengiriman sampel regionalisasi pangan yang diuji di Balai Besar POM di Jakarta untuk kopi bubuk (uji okratoksin). Sedangkan pengiriman yang dilakukan di Balai Besar POM di Semarang untuk kategori minuman berperisa tidak berkarbonasi (uji logam). Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2023 dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2023. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki

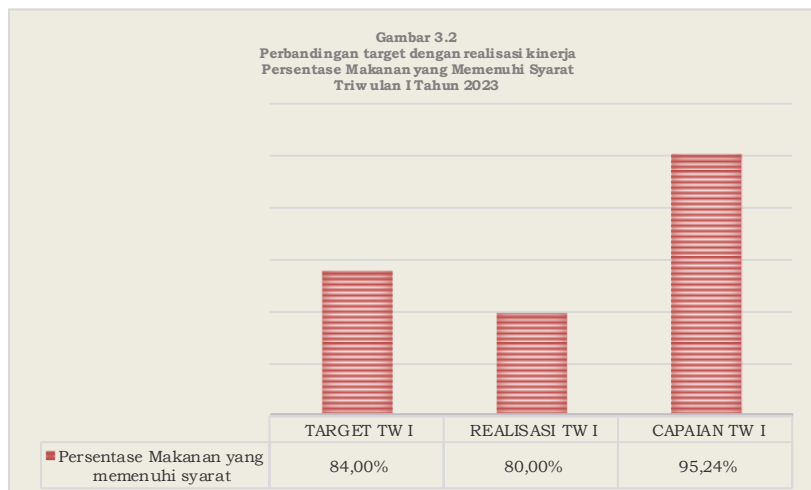


NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6.

TABEL 3.6
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84,00%	80,00%	95,24%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	

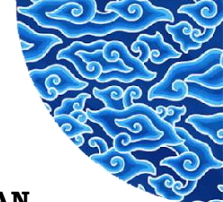
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



Pada triwulan I tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah

sebesar 84,00%. Realisasi pada triwulan I tahun 2023 sebesar 80,00%, dengan rincian 76 sampel memenuhi syarat dan 19 sampel tidak memenuhi syarat. Total sampel acak yang diperiksa dan diuji sebanyak 95 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **95.24 %** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.





B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 84,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **95.24 %** %.

C. ANALISIS PENYEBAB KETIDAKBERHASILAN ATAS CAPAIAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Ketidakberhasilan capaian kinerja indikator ini pada triwulan I tahun 2023 ini disebabkan oleh:

- Terdapat peningkatan jumlah sarana produksi makanan yang memenuhi ketentuan yang diperiksa pada triwulan I yaitu sebanyak 42 sarana. Peningkatan ini merupakan dampak inisiatif dari sarana produksi makanan dalam kepatuhan pemenuhan GMP dari sarana produksi yang diperiksa.
- Sampai dengan triwulan I terdapat 19 sampel TMS hasil pengujian, dimana sebagian besar berasal dari sampel dengan parameter uji kimia Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi persyaratan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui KIE yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial berupa infografis dan IG Live Kelom Geulis maupun elektronik berupa Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan Radio.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- Penerapan sanksi pidana terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan makanan Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar. Sanksi ini berkaitan dengan pelanggaran Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pada triwulan I tahun 2023 dilakukan pengawasan melalui patroli siber terkait produksi/distribusikan pangan yang dilarang beredar. Untuk tindak lanjut dari patroli siber yang sudah dilakukan adalah melaporkan hasil patroli siber dan kemudian akan dilakukan *take down* oleh Badan POM Pusat.



- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram dan Twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat bekerjasama dengan radio. Bekerjasama dengan stakeholder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat).

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja:

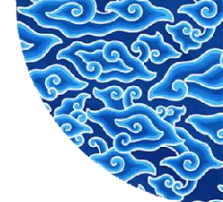
- Pengawasan sarana produksi makanan yang dilakukan secara rutin oleh Balai Besar POM di Bandung meliputi sarana Industri Pangan Olahan MD, Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sampai dengan triwulan I tahun 2023, jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 71 sarana namun tidak inline dengan sampel yang diperiksa maupun diuji sehingga sampel yang tms seakan-akan menggambarkan kondisi pabrik yang dintervensi.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan radio.
- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB yaitu sebanyak 71 sarana produksi yang diperiksa pada triwulan I tahun 2023.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan, yaitu sebanyak 119 sarana distribusi yang diperiksa pada triwulan I tahun 2023.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
- Melaporkan hasil evaluasi penandaan ke pusat untuk ditindaklanjuti ke produsen





F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

3. PRESENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

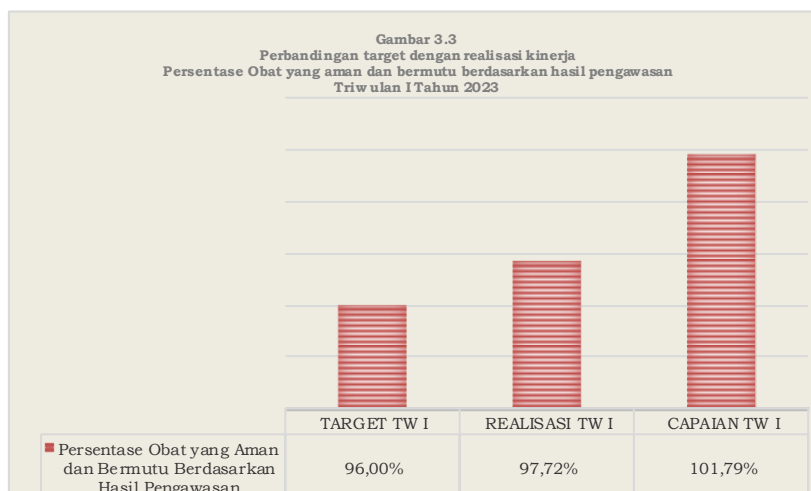
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted yang memenuhi syarat tahun 2023 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji tahun 2023. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2022. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka., Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.7.

TABEL 3.7
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.00%	97.72%	101.79%	MEMENUHI EKSPEKTASI	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023





Pada triwulan I tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sebesar 96.00%. Sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 88 sampel dengan rincian sebanyak 86 sampel memenuhi syarat dan

2 sampel tidak memenuhi syarat, sehingga persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh sebesar 97.72%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **101.79%** dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 96.00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 101,79%.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Sampai Triwulan I dari 88 sampel yang diperiksa dan diuji terdapat 2 TMS Mutu Pengujian, yang berasal dari 1 sampel kosmetika dan 1 sampel obat tradisional dengan parameter uji mikrobiologi (angka lempeng total dan Enterobacter).
- Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, Suplemen Kesehatan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling.
- Pada triwulan I tahun 2023, sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan meningkat menjadi 199 sarana dari 231 sarana yang diperiksa.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public



Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter), media masa melalui iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.

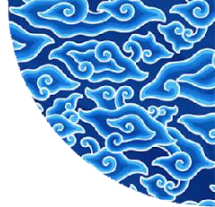
- Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tradisional dan kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE)/ tidak memenuhi standar yang dilarang beredar. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Penerapan sanksi pidana diharapkan mampu memberikan efek jera bagi masyarakat luas.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja:

- Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, dilakukan sesuai perencanaan pada triwulan I. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
- Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Pada triwulan I tahun 2023 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 45 sarana.
- Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian meliputi, Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Toko Obat, Klinik, Puskesmas, dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, serta suplemen kesehatan. Pada triwulan I tahun 2023 jumlah sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sejumlah 231 sarana.

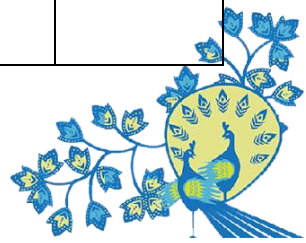




E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
a	Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus penandaan obat tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional, pemenuhan CPKB dan CDOB. Dengan kondisi pandemi yang sudah menurun dengan tetap menjaga proses pencapaian target produksi selama triwulan IV dapat dioptimalkan dengan pemeriksaan secara luring	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan secara luring dan daring		
b	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan, diantaranya dengan pemantauan rutin CAPA yang masuk dan yang telah dievaluasi.	Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi (SMKPO) tanggal 20 Oktober 2022		
c	Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberian layanan informasi tentang Obat secara daring maupun tatap muka.		Melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat, pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka	Desember 2023
d	Peningkatan kegiatan sosialisasi (KIE) tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM. KIE tentang obat juga dilakukan melalui Media Sosial serta KIE yang dilaksanakan melalui Webinar Warta POPA yang dilaksanakan setiap bulan.		Melakukan penyebaran informasi terkait peraturan bagi pelaku usaha dan masyarakat, publik warning melalui subsite, media sosial, media luar ruang dan KIE melalui Program Warta POPA bulanan	Desember 2023
e	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.	1. Dilakukan FGD Upaya Pengendalian Peredaran Psikotropika di Jawa Barat Tanggal 14 Desember 2022 2. Dilakukan FGD Sarasehan bersama lintas sektor dengan tema Penggalan Informasi		

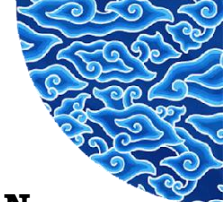


Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
		Empiris bahan alam berdasarkan Kearifan Lokal tanggal 13 Desember 2022 3. Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian tanggal 15 Desember 2022 4. Kegiatan Farmacovigilance terkait penelusuran kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada Anak bersama dengan Dinkes KBB pada tanggal 25 Oktober 2022		
f	Pro justicia memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang. Secara formal sanksi administrative pro justicia menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembinaan dan penyebaran informasi mengenai penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar dilakukan melalui tatap muka maupun daring menggunakan Media sosial dan media elektronik.		Melakukan pembinaan dan penyebaran informasi mengenai penerapan sanksi administratif atau pidana terhadap sarana produksi atau distribusi yang memproduksi/mendistribusikan obat tanpa izin edar (TIE) melalui media sosial atau media elektronik	Desember 2023

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.





4. PRESENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Sampel targeted yang telah disampling sampai Triwulan I adalah sebanyak 59 sampel yang meliputi sampel PJAS 32 sampel, sampel kasus 26 sampel dan sampel UMKM 1 sampel. Sampel kasus terdiri dari sampel Kasus Kurma isi sebanyak 3 sampel, Biskuit Batita sebanyak 4 sampel, Minuman Kekinian sebanyak 18 sampel dan Kopi Stamina sebanyak 1 sampel. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat pada tahun 2023 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji pada tahun 2023. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.8.

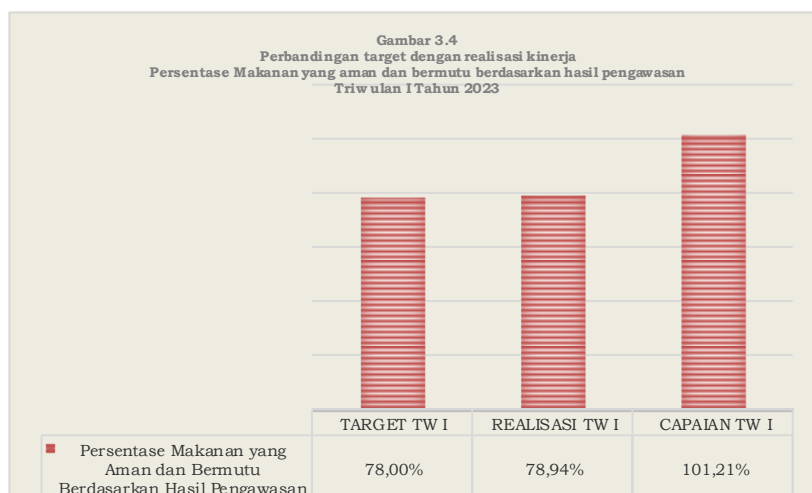
TABEL 3.8.
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	78,00%	78,95%	101.21%	MEMENUHI EKSPEKTASI	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

Pada triwulan I tahun 2023, target yang ditetapkan indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 78,00%. Persentase Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2023 sebesar 78.95%, dengan rincian sebanyak 45 sampel targeted memenuhi syarat dan 12 sampel targeted tidak memenuhi syarat dari total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 57 sampel targeted. Dengan demikian persentase capaian target





indikator
 sasaran
 tersebut diatas
 adalah sebesar
101.21%
 dengan kriteria
MEMENUHI
EKSPEKTASI.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 78,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 101.21%.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

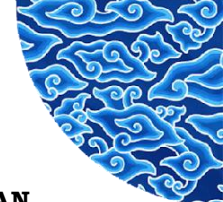
Kebhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Sampai dengan triwulan I tahun 2023 hasil pengujian sampel makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan baru 30,48% (57 sampel dari total 187 sampel) sehingga belum menggambarkan hasil pengujian secara keseluruhan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter) serta iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.





D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

- Telah dilaksanakannya Sebagian tahapan kegiatan program nasional keamanan pangan yang meliputi PJAS Aman, Gerakanan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di dua Kabupaten /Kota

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi syarat melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung atau melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter.
- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta melakukan advokasi pengawasan pangan fortifikasi secara langsung di tempat produsen.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

5. PRESENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

Sampel pangan Fortifikasi yang telah disampling sampai Triwulan I adalah sebanyak 70 sampel yang terdiri dari sampel garam beryodium sebesar 70 sampel. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023 dibandingkan dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji pada tahun 2023. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-

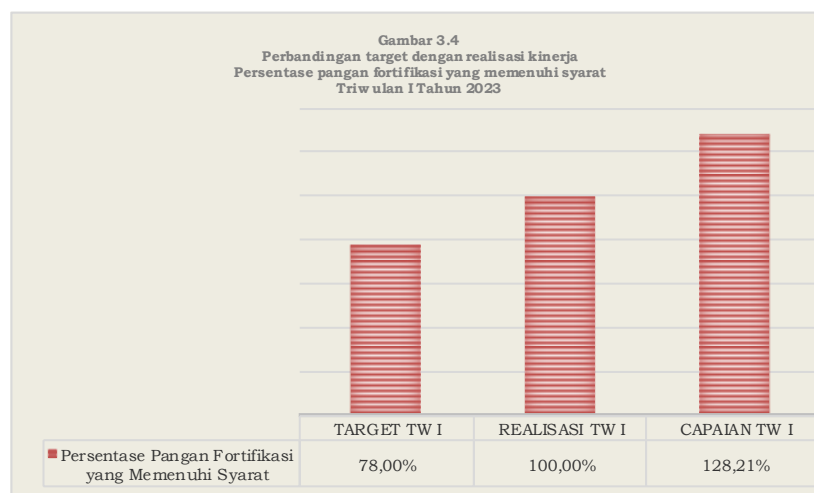


undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.9.

TABEL 3.9.
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	78,00%	100%	128.21%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



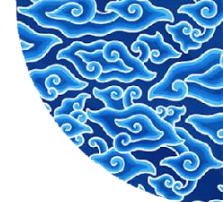
Pada triwulan I tahun 2023, target yang ditetapkan indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun

2023 adalah sebesar 78,00%. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2023 sebesar 100%, dengan rincian sebanyak 52 sampel pangan fortifikasi memenuhi syarat dari total sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 52 sampel pangan fortifikasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **128.21%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan.**

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 78,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I sebesar 100 % dan dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 128.21%.





C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KETIDAKBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

- Sampai dengan triwulan I tahun 2023 hasil pengujian sampel makanan fortifikasi baru 41,60% (52 sampel dari total 125 sampel) sehingga belum menggambarkan hasil pengujian secara keseluruhan.
- Belum terpenuhinya GMP sarana produksi garam, dimana sebagian besar sarana produksi garam masih merupakan UMKM.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan, terutama sarana produksi garam terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter) serta iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- Meningkatnya pemahaman dari pelaku usaha tentang aspek CPPOB serta kesadaran untuk mempertahankan pemenuhan aspek CPPOB tidak hanya pada saat di inspeksi namun sudah menjadi kebijakan yang harus ditaati sarana produksi.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Indikator ini baru ditambahkan di triwulan I sehingga belum ada rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



**SASARAN
KEGIATAN
KE-2**

**MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT
TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN
MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: (1) Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat; (2) Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan; dan (3) Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Interprestasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengacu pada skala 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

TABEL 3.10
KATEGORI INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX)
TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

SKOR	INTERPRESTASI
$\leq 45,00$	TIDAK BAIK
45,01 – 60,00	KURANG BAIK
60,01 – 75,00	CUKUP BAIK
75,01 – 90,00	BAIK
$\geq 90,01$	SANGAT BAIK



**SASARAN
KEGIATAN
KE-3**

**MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI
BANDUNG**

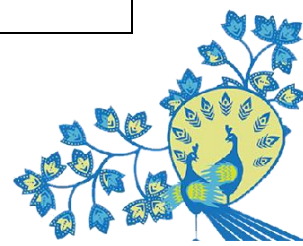
Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Pengukuran indikator tersebut Sebagian besar merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran kecuali Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

**1. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

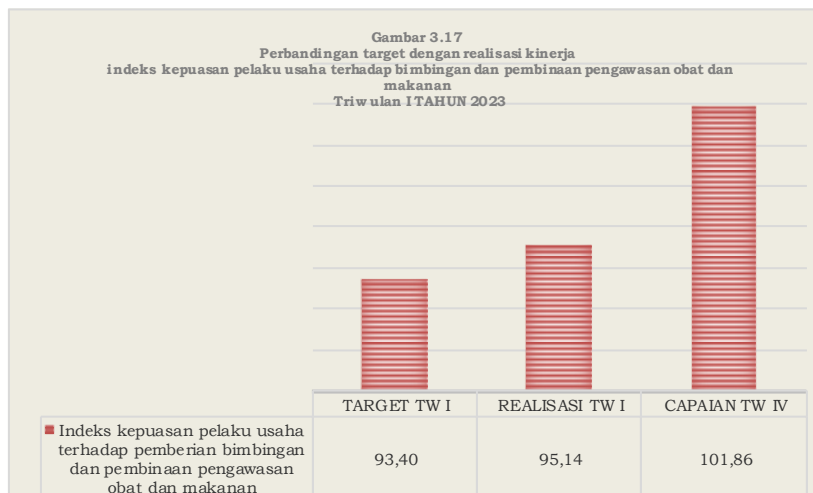
Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/ pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah: (1). Aspek bimbingan dan pembinaan; (2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; (3). Aspek penanganan saran dan masukan; (4). Aspek manfaat; (5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan; dan (6). Aspek pengetahuan dan pemahaman.

TABEL 3.11
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN
DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	93.40	95.14	101.86%	MEMENUHI EKSPEKTASI	



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021



Pada triwulan I tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 93-95. Pada tahun 2023, Indeks kepuasan

pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan sebesar 93,40. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **101,86%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 93,40. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 101,86%.

C. ANALISIS KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Kebhasilan pencapaian pada triwulan I tahun 2023 ini disebabkan oleh:

- ☞ Berbagai program Bimbingan Teknis di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.
- ☞ Program Desk CAPA yang rutin dilakukan bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil audit dalam rangka sertifikasi atau inspeksi.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023, antara lain :

- ☞ Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek, Sosialisasi, Diseminasi, Pendampingan dan Desk.



- ☪ Bimbingan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan lebih fokus pada materi yang berdampak langsung pada percepatan perijinan/sertifikasi pelaku usaha.
- ☪ Melaksanakan program pendampingan bagi pelaku usaha bagi UMKM sehingga diperoleh kemudahan dalam mendapatkan izin edar BPOM.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

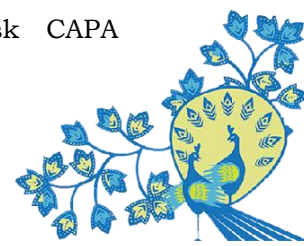
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- ☪ Pada tanggal 16-17 Maret 2023 dilaksanakan kegiatan Bimtek Pelaku Usaha dan Desk Evaluasi Dokumen yang diikuti oleh 42 orang pelaku usaha, yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat dan sedang mengurus Sertifikat Izin Penerapan CPPOB hadir dan diberikan pendampingan secara langsung oleh petugas BBPOM di Bandung. Output dari kegiatan Bimtek dan Desk ini adalah telah berhasil menerbitkan 12 Sertifikat Izin Penerapan CPPOB yang meliputi antara lain jenis pangan daging olahan beku, minuman buah, konsentrat minuman buah, air minum dalam kemasan, makanan siap saji, bumbu siap saji, dan lain sebagainya.

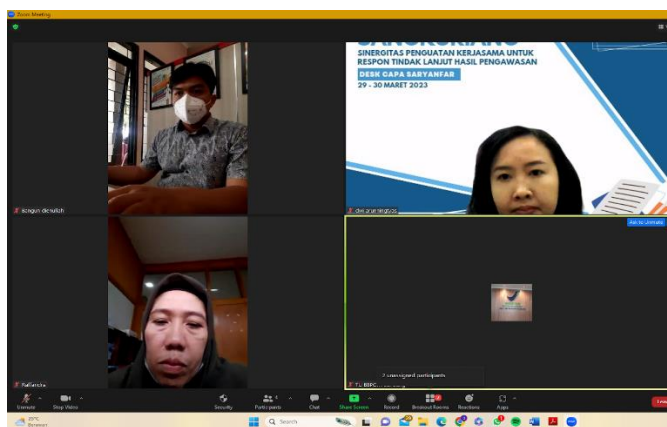


Gambar 3.1 Kegiatan Bimtek dan Desk kepada pelaku usaha

- ☪ Telah dilaksanakannya Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha terutama bagi UMKM Pangan di Jawa Barat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang keamanan pangan, mengetahui tata cara sertifikasi produksi pangan untuk menghasilkan produk olahan pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
- ☪ Telah dilaksanakan kegiatan Desk CAPA terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada sarana pelayanan kefarmasian. Desk CAPA



dilaksanakan dalam rangka meningkatkan respon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian serta untuk penjaminan keamanan distribusi obat di masyarakat.



Gambar 3.2 Kegiatan Desk CAPA

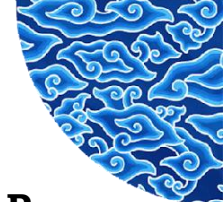
F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu: (1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*); dan (2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.





3. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran dan mengacu pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan PemanPAN dan RB Nomo 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh dikelompokkan sebagai berikut:

TABEL 3.12
NILAI KONVERSI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

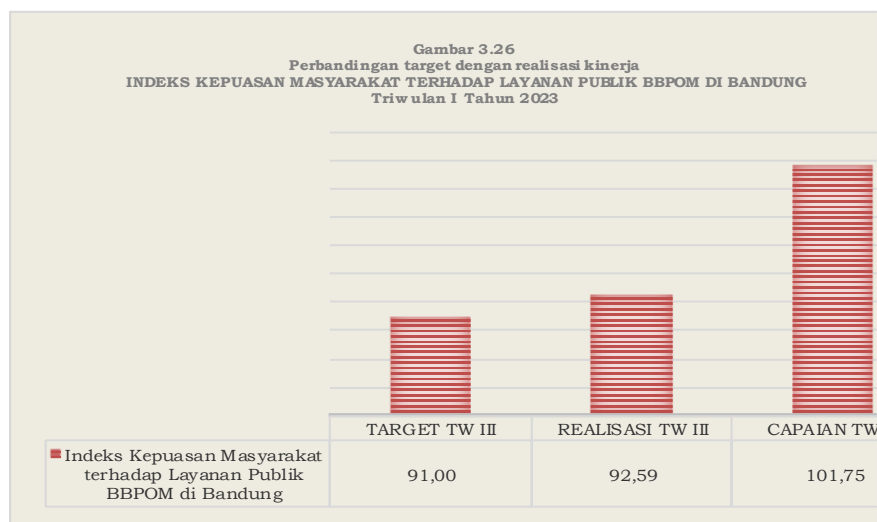
Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.13.

TABEL 3.13.
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK
BBPOM DI BANDUNG”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	91,00	92,59	101,75%	MEMENUHI EKSPEKTASI	



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



Pada 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91,00. Hasil survey dengan jumlah

responden menunjukkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung sebesar 92,59 (Sangat Baik). Dengan demikian capaian indikator tersebut diatas adalah sebesar **101,75%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator tersebut adalah sebesar 91,00. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **101,75%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Seluruh kegiatan pelayanan publik BBPOM di Bandung mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan BBPOM di Bandung dan Surat Keputusan Kepala BBPOM di Bandung Nomor OT.01.03.12A.12A4.06.22.95 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Selain itu, telah standar pelayanan publik BBPOM di Bandung telah dipublikasikan kepada pihak eksternal melalui surat kabar, baliho/banner, media sosial, website BBPOM di Bandung.



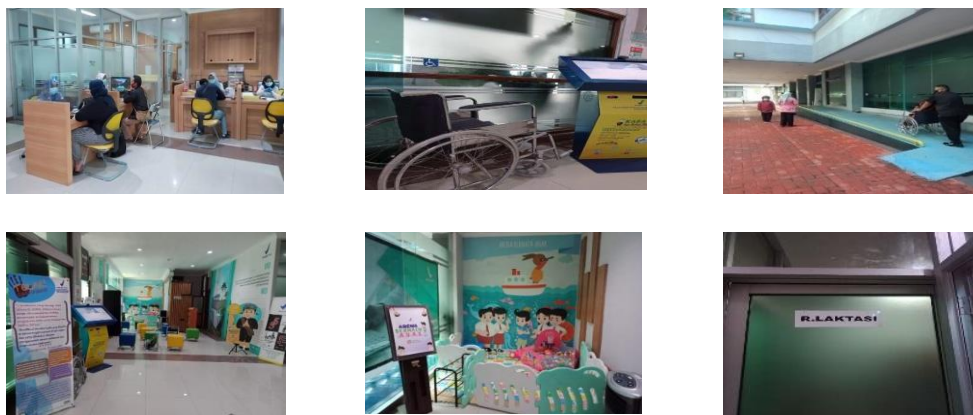
- Seluruh petugas pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Bandung telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BBPOM di Bandung Nomor PI.06.06.12A.12A5.01.23.192 Tahun 2023 tentang Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung.
- BBPOM di Bandung memiliki maklumat pelayanan yang telah dipublikasikan melalui media sosial BBPOM di Bandung, media cetak dan media elektronik.



Gambar 3.3
Maklumat Pelayanan BBPOM di
Bandung

- BBPOM di Bandung telah memiliki SOP Mikro terkait seluruh pelayanan publik dan secara berkala dilakukan kaji ulang dokumen.
- Inovasi Pelayanan Publik BBPOM di Bandung antara lain:
 - BBPOM BANDUNG SMART CONNECTION yaitu: subsite Balai Besar POM di Bandung menyediakan bagian khusus yang berisi berbagai link aplikasi dan media pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan terintegrasi dengan bandung smart city.
 - LACAK PASTI (Layanan Administrasi dan Pelacakan + Pembayaran Pakai Sistem Elektronik) yaitu: Aplikasi publik untuk melacak status pengujian sampel pihak ke-3, dan informasi mengenai layanan pengujian Balai Besar POM di Bandung, seperti Tarif dan Parameter Uji, Prosedur Pelayanan, Persyaratan, dan FAQ.
 - KABAYAN (Kepala Balai Melayani) yaitu: Layanan khusus whatsapp mengenai pengaduan dan informasi gratis seputar obat, pangan, obat tradisional, suplemen kesehatan hingga kosmetik.
 - KELOM GEULIS (Kenalan dengan BBPOM di Bandung Berbagi Edukasi dan Layanan Informasi, Sae Pisan) yaitu: berupa kegiatan KIE yang dilakukan melalui IG live maupun bekerja sama dengan radio
 - SiPETA (Sistem PELayanan TAMu di Balai Besar POM di Bandung) yaitu: berupa buku tamu elektronik dan nomor antrian layanan publik BBPOM di Bandung, memuat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), informasi layanan publik Badan POM dan menampilkan status kehadiran pejabat struktural BBPOM di Bandung secara real time.

- Si ITEUNG (Siap Beri Informasi 'Tuk Seluruh Negeri' yaitu: berupa layanan informasi/ konsultasi tatap muka secara online/ daring. Pelanggan yang akan berkonsultasi mendaftar melalui WA 0821 2893 6046.
- WARTA POPA (Warta Peduli Obat dan Pangan Aman) yaitu: program penyampaian berita dan informasi kepada masyarakat tentang Peduli Obat dan Pangan Aman, berupa webinar, seminar, sosialisasi melalui infografis/ media massa.
- MELODI POPA (Melodi Peduli Obat dan Pangan Aman) yaitu: merupakan kumpulan lagu tentang Peduli Obat dan Pangan Aman yang digunakan sebagai salah satu alat mengajar bagi peserta KIE/ bimtek.
- LAYANAN SERTIFIKASI SECARA DARING yaitu: merupakan layanan sertifikasi secara daring di lingkungan BBPOM di Bandung. Memungkinkan tetap dilakukannya pemeriksaan/ audit sarana pada kondisi tidak dapat dilakukan secara onsite/ offline
- Seluruh pelayanan publik dan inovasi tersebut diatas telah dipublikasikan pada website BBPOM di Bandung, media sosial BBPOM di Bandung, WAG Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, media cetak dan media elektronik.
- Adanya SK *Reward and Punishment* Pelayanan Publik dan laporan pengaduan serta evaluasi *reward and punishment*.
- Sarana pelayanan publik BBPOM di Bandung sudah terpusat dalam satu ruangan, meliputi: Layanan Informasi, Layanan Pengujian, Layanan Pengaduan, dan Layanan Sertifikasi. Selain itu, sarana ruang tunggu pelayanan telah dilengkapi : Free Coffee, Akses Wifi Gratis, Kantin Kejujuran, Kotak Saran, Media Cetak/Media siar (TV), Area Bermain Anak, Sarana untuk Disabilitas dan Ruang Laktasi serta area parkir khusus tamu.



Gambar 3.4
Sarana Pelayanan Publik BBPOM di Bandung



Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENUNJANG PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

- Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik yang melibatkan berbagai stakeholder terkait secara daring dan luring, dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi tentang terobosan yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung serta dalam rangka mengumpulkan masukan dari pelaku usaha dan mitra kerja untuk membangun/memperbaiki sistem pelayanan publik Balai Besar POM di Bandung menjadi lebih baik.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Segera menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan FKP.

Rekomendasi untuk tindaklanjut triwulan I adalah sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022.
- Melaksanakan seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022.
- Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



**SASARAN
KEGIATAN
KE-4**

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN
OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK
DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 6 (enam) indikator yang seluruhnya Merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keenam indikator diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **88,30%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.14.

TABEL 3.14
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-4
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	98,00 %	98,60 %	100,62%	MEMENUHI EKSPEKTASI	
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00%	88,75%	113,78%	MEMENUHI EKSPEKTASI	
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00%	100,00%	106,38%	MEMENUHI EKSPEKTASI	
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	66,38%	100,57%	MEMENUHI EKSPEKTASI	
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00%	84,57%	108,42%	MEMENUHI EKSPEKTASI	
6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4,40	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00%	0,00%	0,00%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			88,30%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	



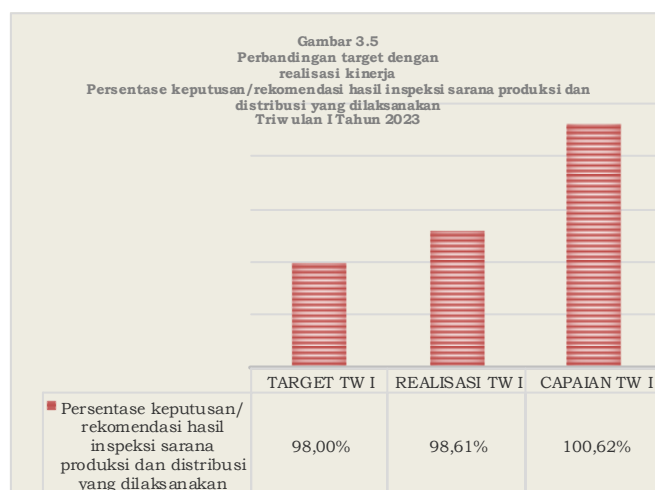
1. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur dari nilai rata-rata persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT, persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan I tahun 2023.

TABEL 3.15
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	98,00 %	98,60 %	100,62%	BAIK	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN



2023 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan s.d triwulan I tahun 2023 sebesar 98,60%, dengan rincian persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT

yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain sebesar 80,00%; dan persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%. Target yang



ditetapkan untuk indikator ini sebesar 98%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **100,61%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 indikator sasaran strategis ini ditetapkan sebesar 98%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tahun 2023, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 100,62%.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG AKAN DILAKUKAN

Kebhasilan dan peningkatan kinerja indikator ini pada triwulan I tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan telah dilaksanakan secara konsisten dan efisien, antara lain melalui rekonsiliasi data oleh petugas setiap awal bulan dan pengumpulan dan pengolahan data telah dilakukan secara sistematis.
- Koordinasi internal dan eksternal lebih intensif, melalui komunikasi baik langsung ataupun tidak langsung. Dilakukan komunikasi secara aktif untuk jemput bola pelaksanaan rekomendasi oleh pemangku kepentingan.

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan.
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program dan kegiatan yang menyebabkan peningkatan pencapaian kinerja:

- Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut yang diterbitkan dilakukan secara terus menerus sehingga tindak lanjut yang dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.
- Sosialisasi kepada lintas sektor terkait melaksanakan tindak lanjut dilaksanakan secara konsisten



- Komunikasi dan Koordinasi dengan lintas sektor dilaksanakan secara berkelanjutan baik melalui media formal ataupun informal

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.16
 MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
 “PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA
 PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”
 TRIWULAN I TAHUN 2023

Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi	Timeline	
a Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) lebih ditingkatkan	Mengikuti kegiatan pusat berupa forum komunikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi tiap komoditi pada triwulan 1 tahun 2023	Kegiatan Sangkuring	Triwulan III dan Triwulan IV	
b Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi secara berkala setiap bulan	monitoring dan evaluasi pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi secara berkala lebih ditingkatkan	Triwulan II, III dan IV	

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

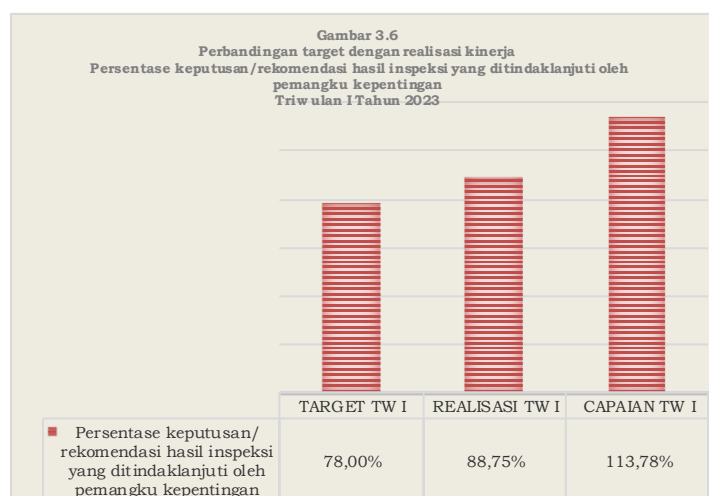
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur rata-rata persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d tahun berjalan.



TABEL 3.17
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00%	88,75%	113,78%	MEMENUHI EKSPEKTASI	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



Pada tahun 2023, target yang ditetapkan adalah sebesar 78,00%, dengan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku

kepentingan sebesar 88,75%. Rincian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 77,50% dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebesar 100%. Dengan demikian, capaian kinerjanya sebesar **113,78%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

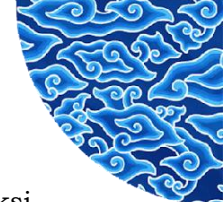
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 indikator sasaran strategis ini ditetapkan sebesar 78%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tahun 2023, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **113,78%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan dan peningkatan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2023 disebabkan antara lain:





- Respon dari stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan meningkat karena dilaksanakannya kegiatan Desk CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) .
- Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan sudah efektif.
- Pengumpulan dan pengolahan data sudah difasilitasi oleh bitly Monitoring Tindak Lanjut dan Rekomendasi selagi Aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP) dalam tahap penyempurnaan.
- Rekonsiliasi data oleh Petugas setiap akhir bulan.
- Dibuat template Surat Permohonan Penyampaian CAPA yang ditujukan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan respon tindak lanjut dari pelaku usaha.

Rekomendasi yang akan digunakan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain:

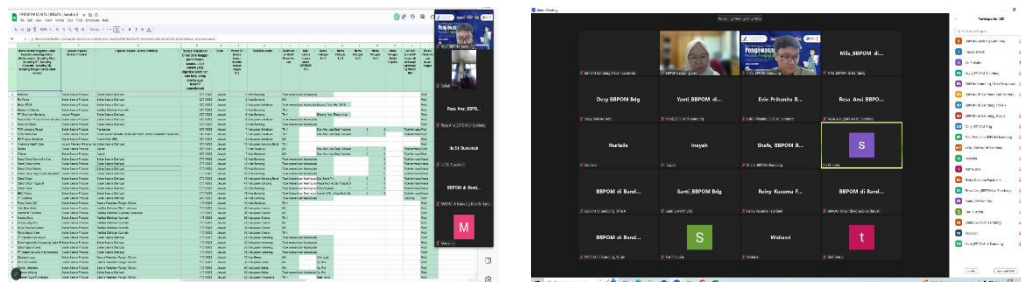
- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dalam pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait penyampaian hasil tindak lanjut dari Balai Besar POM di Bandung
- Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha secara
- Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

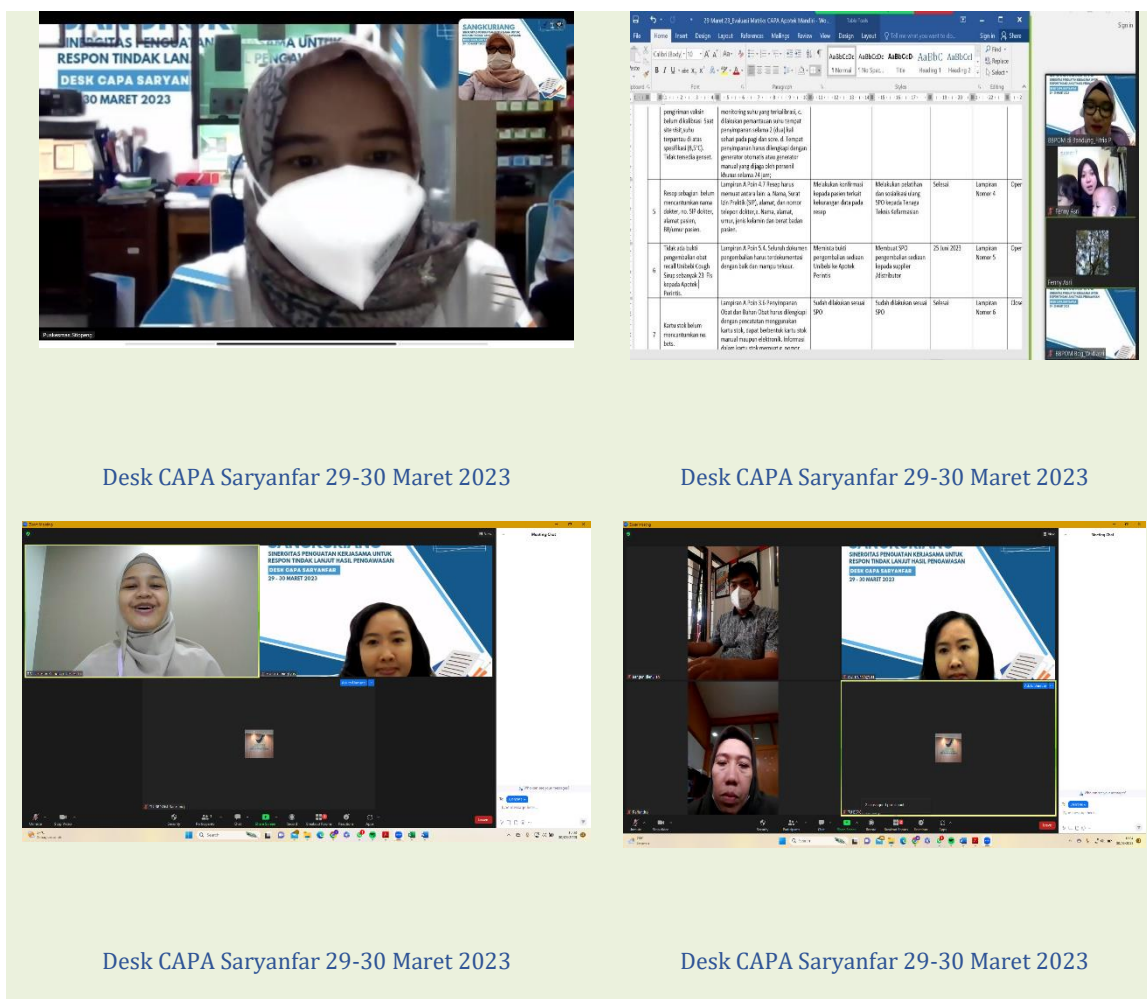
Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2023 sebagai berikut:

- Dilaksanakannya rapat monitoring dan evaluasi secara konsisten, dalam rangka pemantauan tindak lanjut dari pemangku kepentingan.
- Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Desk CAPA Sarana Pelayanan Kefarmasian tanggal 29-30 Maret 2023 secara daring.





Gambar 3.5 Rapat Monitoring dan Evaluasi



Desk CAPA Saryanfar 29-30 Maret 2023

Desk CAPA Saryanfar 29-30 Maret 2023

Desk CAPA Saryanfar 29-30 Maret 2023

Desk CAPA Saryanfar 29-30 Maret 2023

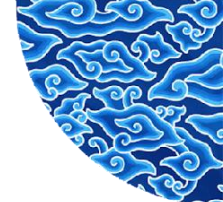
Gambar Desk 3.6 Capa Saryanfar 29 – 30 Maret 2023

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.





Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindaklanjut yang direncanakan, antara lain:

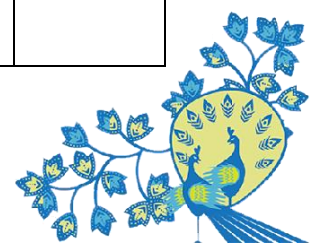
- Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan dilakukan setiap bulan, serta dilaporkan melalui Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Inspeksi Tahun 2023.
- Pelaksanaan kegiatan Sangkuriang yang berupa FGD Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi di wilayah masing-masing.
- Pemberdayaan Grup Whatsapp Forum Komunikasi antara BBPOM di Bandung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wilayah Jawa Barat dalam memberikan informasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana di wilayah masing – masing.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.17
 MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
 “PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG
 DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”
 TRIWULAN I TAHUN 2023

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha	Melaksanakan pembinaan pada pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi sanksi administrasi. Pembinaan berupa Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Desk CAPA Sarana Pelayanan Kefarmasian tanggal 29-30 Maret 2023	pembinaan pada pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi sanksi administrasi lebih ditingkatkan	Triwulan II, III dan IV
b Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.	Monitoring dan evaluasi CAPA hasil pemeriksaan secara berkala	Monitoring dan evaluasi CAPA hasil pemeriksaan secara berkala lebih ditingkatkan	Des 2023
c Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak		Pertemuan dengan lintas sektor terkait penyampaian dan evaluasi hasil pengawasan Obat dan Makanan lebih efektif	Triwulan IV Tahun 2023



Rekomendasi		Tindaklanjuti		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.			
d	Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait penyampaian hasil tindak lanjut dari Balai Besar POM di Bandung	Melakukan pembinaan saat pemeriksaan dan verifikasi atas CAPA yang disampaikan	Pembinaan saat pemeriksaan dan verifikasi atas CAPA yang disampaikan lebih ditingkatkan	Des 2023
e	Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha	Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha	Evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha lebih ditingkatkan	Des 2023

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

3. PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: (1). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; (2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; (3). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; (4). Surat rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; (5). Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang; (6). Hasil Pemeriksaan dalam

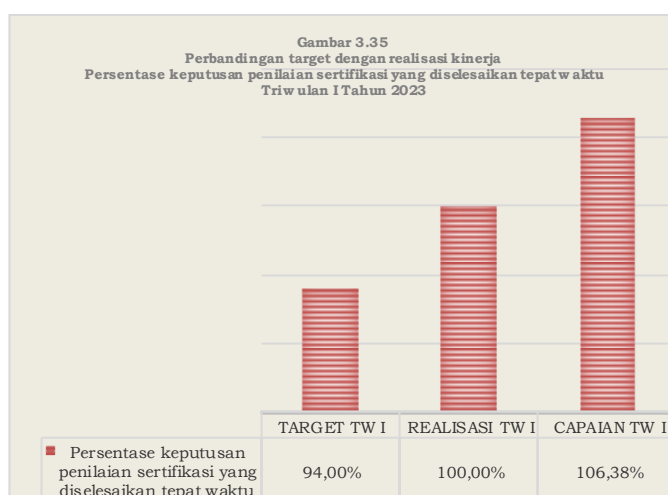


rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil; (7). Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru dan sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; (8). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; (9). Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; (10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; (11). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; dan (12) Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga.

TABEL 3.18
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00%	100,00%	106,38%	MEMENUHI EKSPEKTASI	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



Pada Triwulan I tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 94%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW I tahun 2023 sebesar 100,00%. Dengan rincian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang

diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 515 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 515 permohonan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **106,38 %** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.



TABEL 3.19
HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI
SD TRIWULAN I TAHUN 2023

No.	Rekomendasi	Satuan	Jumlah Permohonan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan tepat waktu	% sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB Bertahap	Rekomendasi	6	6	100
2	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi SK	Laporan	0	0	0
3	Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPKB	Rekomendasi	7	7	100
4	Rekomendasi Penerbitan IP CPPOB Produsen Skala Usaha Besar dan Menengah	Rekomendasi	26	26	100
5	Penerbitan IP CPPOB Produsen Skala Usaha Mikro dan Kecil	Sertifikat	59	59	100
6	Hasil Pemeriksaan Verifikasi Penerbitan IP CPPOB Skala Usaha Mikro dan Kecil	Laporan	13	13	100
7	Hasil Pemeriksaan Audit Surveilans SMKPO	Laporan	0	0	0
8	Hasil Pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA Sertifikasi CDOB	Sertifikat	12	12	100
9	Hasil Pemeriksaan OT/ SK dalam rangka pendaftaran produk impor	Laporan	0	0	0
10	Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetika	Rekomendasi	17	17	100
11	Penerbitan SKI/ SKE Produk Pangan Olahan	Surat Keterangan	147	147	100
12	Sertifikat Hasil Pengujian Pihk Ketiga	Sertifikat	228	228	100
TOTAL			515	515	100%

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 94,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I sebesar 100,00% dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 100,38%.

Peningkatan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2023 disebabkan antara lain :

- Adanya kebijakan Badan POM dalam penerapan CPOTB bertahap, memudahkan pelaku usaha obat tradisional yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dalam memenuhi persyaratan teknis dalam CPOTB.

- ✎ Terbitnya PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, yang merupakan perubahan atas penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan menjadi izin penerapan CPPOB yang memudahkan pelaku UMKM pangan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penerapan CPPOB untuk sarana produksinya sehingga UMKM Pangan tersebut dapat melanjutkan proses registrasi pangan.
- ✎ Keterbukaan dan kemudahan akses informasi bagi seluruh pelaku usaha khususnya terkait persyaratan dan prosedur sertifikasi baik melalui media elektronik dan nonelektronik yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung.
- ✎ Adanya aplikasi e-bpom yang memfasilitasi layanan proses perizinan eksportasi yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung semakin stabil, selain itu kompetensi dan komitmen SDM evaluator yang tinggi sehingga dapat melakukan evaluasi sesuai dengan persyaratan dan memenuhi timeline yang telah ditetapkan.
- ✎ Berbagai Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.
- ✎ Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM Balai Besar POM di Bandung dalam kegiatan sertifikasi sehingga sarana produksi dan sarana distribusi yang mengajukan permohonan dalam rangka sertifikasi dapat memenuhi ketentuan dan dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Meskipun jumlah SDM sangat kurang dibandingkan dengan beban kerjanya.

Rekomendasi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

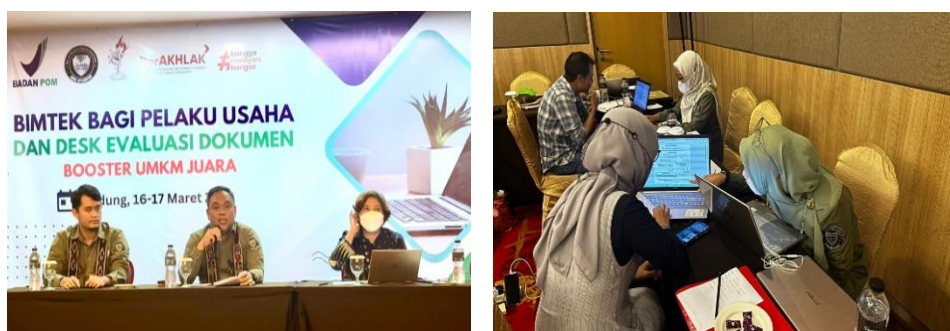
- ✎ Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/*workshop*/bimtek/diseminasi/webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- ✎ Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- ✎ Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi.



**C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- ✎ Meningkatkan monitoring CAPA sebagai bentuk tindaklanjut pengawasan dengan cara membuat tabel monitoring surat masuk beserta progresnya.
- ✎ Pada tanggal 16-17 Maret 2023 dilaksanakan Kegiatan Bagi Pelaku Usaha dan Desk Evaluasi Dokumen bagi para produsen skala usaha mikro dan kecil yang sedang berproses mengajukan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) yang diikuti oleh 32 pelaku usaha. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan materi terkait Penerapan Prinsip CPPOB pada Industri/UMKM Pangan Olahan dan Tata Cara Pengisian Form Penilaian Mandiri, kemudian dilanjutkan dengan Desk Evaluasi Dokumen Pengajuan IP CPPOB antara pelaku usaha dengan Evaluator. Sejumlah 12 Sertifikat Izin Penerapan CPPOB yang meliputi antara lain jenis pangan daging olahan beku, minuman buah, konsentrat minuman buah, air minum dalam kemasan, makanan siap saji, bumbu siap saji, dan lain sebagainya dapat diterbitkan.



Gambar 3.7 Bimtek Bagi Pelaku Usaha dan Desk Evaluasi Dokumen

- ✎ Melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku usaha bersama lintas sektor, yaitu:
 - a. Pada tanggal 23 Februari 2023 memberikan materi Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi Industri AMDK dan menyelenggarakan layanan help-desk pada kegiatan Seminar dan Sosialisasi DPD ASPADIN Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.





Gambar 3.8 Seminar dan Sosialisasi DPD ASPADIN Jabar, DKI Jakarta dan Banten

- b. Pada tanggal 9 Maret 2023 memberikan sosialisasi mengenai Standar Pemenuhan Keamanan Pangan bagi Wirausaha Baru IKM Pangan di Kabupaten Bandung Barat pada kegiatan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian.
- c. Pada tanggal 20-21 Maret 2023 memberikan sosialisasi mengenai Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada acara Peningkatan Wawasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Usaha Peternakan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

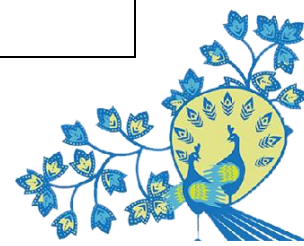
☛ Mengikuti kegiatan pelatihan/ peningkatan kompetensi petugas, yaitu:

- a. Pada tanggal 24 Maret 2023, petugas sertifikasi Balai Besar POM di Bandung mengikuti pelatihan Evaluasi Audit Internal di Sarana Peredaran Pangan Olahan bagi evaluator SMKPO yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM RI.
- b. Pada tanggal 27-30 Maret 2023, petugas sertifikasi Balai Besar POM di Bandung mengikuti pelatihan Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang digelar oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagai upaya peningkatan kompetensi petugas.

☛ Pendampingan/fasilitasi registrasi melalui layanan Whatsapp Sertifikasi dengan fasilitator/petugas sertifikasi.

TABEL 3.20
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”

Rekomendasi		Tindaklanjuti		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
a	Kompetensi SDM terus ditingkatkan, terutama personil baru sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/	Personil baru mengikuti pelatihan pembentukan inspektur junior OT/SK serta pelatihan evaluasi audit internal di sarana peredaran pangan olahan	-	-



Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	workshop/ bimtek/ diseminasi/ seminar mengenai CPPOB, CPOTB, CPKB, dan CDOB.	bagi evaluator SMKPO.		
b	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha.	Dilakukan Bimtek Pelaku Usaha dan Desk Evaluasi Dokumen kepada para pelaku usaha yang sedang berproses sebagai bentuk monitoring dan evaluasi serta untuk mempercepat waktu penyelesaian dokumen sertifikasi	-	-
c	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap perencanaan yang dibuat pada awal tahun.	-	-

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2. Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

4. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun 2023.

TABEL 3.21
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TRIWULAN I TAHUN 2023

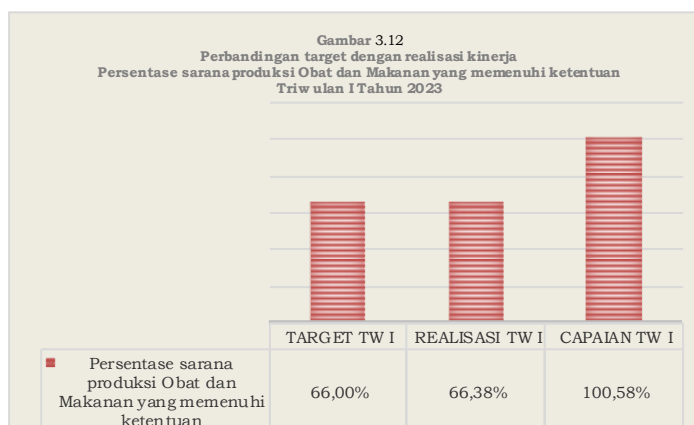
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00%	66,38%	100,58%	MEMENUHI EKSPEKTASI	



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

Pada triwulan I tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis Pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 66.00%. Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 66,38%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **100,58%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 77 sarana dari 116 sarana yang telah diperiksa pada Triwulan I tahun 2023.

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 66.00%. Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 66,38%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar



100,58% dengan kriteria **Memenuhi Syarat**. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 77 sarana dari 116 sarana yang telah diperiksa pada Triwulan I tahun 2023.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis indikator ini adalah sebesar 66%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **100,58%** dengan kriteria **Memenuhi Syarat**.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS CAPAIAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait GMP kepada pelaku usaha telah dilakukan secara terus menerus, melalui berbagai media, baik secara luring

ataupun daring. Hal tersebut menyebabkan pemahanan pelaku usaha terkait GMP meningkat dan berkorelasi dengan peningkatan pemenuhan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

- Pemberian bimbingan teknis melalui pelayanan *help desk* untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi cukup memadai. Selain itu dilakukan desk CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menindaklanjuti temuan tersebut
- Sosialisasi terkait Keamanan dan Mutu Produk Obat dan Makanan kepada pelaku usaha telah dilakukan secara terus menerus. Keamanan dan Mutu Produk Obat dan Makanan ditentukan oleh peran produsen dalam proses produksinya.
- Peningkatan kompetensi dari petugas Balai Besar POM di Bandung sebagai inspektur dalam pelaksanaan inspeksi sarana produksi meningkat. Peningkatan kompetensi tersebut diperoleh melalui berbagai cara, antara lain mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis, baik secara daring ataupun luring. Pada Triwulan I, petugas telah mengikuti pelatihan, antara lain CPOB, Inspektur CPOTB Junior yang diselenggarakan oleh Badan POM.

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- Peningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop atau bimtek mengenai CPOB, CPPOB, CPOTB dan CPKB dilakukan secara berkelanjutan.
- Sosialisasi, bimbingan teknis dan *help desk* kepada pelaku usaha terkait pengetahuan dan implementasi GMP.

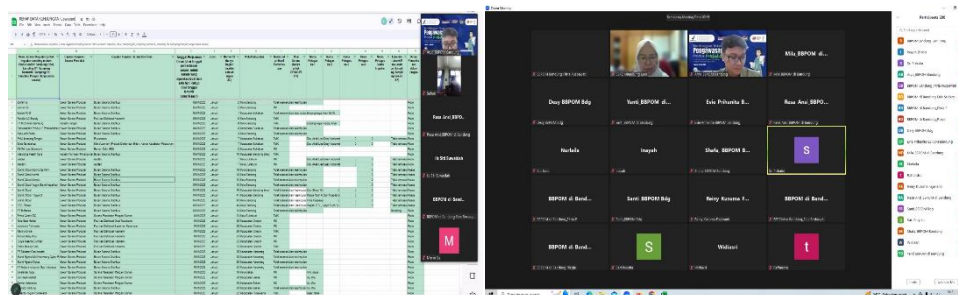
Pembinaan secara terus menerus terkait penyelesaian CAPA untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada triwulan I

- Pembuatan perencanaan pemeriksaan sarana produksi berdasarkan skala prioritas hasil dari analisis resiko.
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten terhadap rencana pelaksanaan terhadap pemeriksaan sarana produksi dan hasil dari pemeriksaan tersebut.





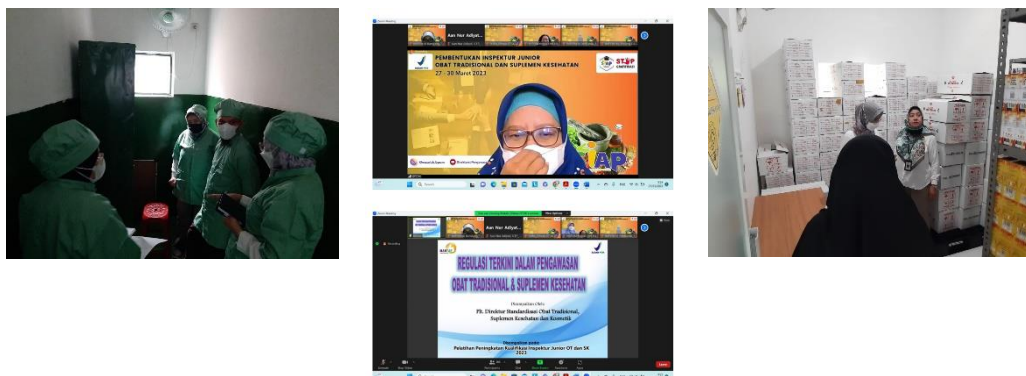
Gambar 3. Monitoring dan Evaluasi

- Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada petugas Balai Besar POM di Bandung.
 - 1) Bimtek CPOB dalam rangka percepatan penyiapan fasilitas produksi obat hasil inovasi (obat berbasis sel dan Jaringan)



Gambar 3. Bimbingan Teknis CPOB

- 2) Pelatihan Inspektur CPOTB Junior



E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL 3.22
 MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
 “PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
 YANG MEMENUHI KETENTUAN”
 TRIWULAN I TAHUN 2023

Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		Timeline
		Rencana Aksi		
1.	Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop atau bimtek mengenai CPOB, CPPOB, CPOTB dan CPKB.	Pelatihan CPOB dan CPOTB Junior	Pelatihan, Bimtek, workshop yang diadakan oleh pusat, UPT lain atau diseminasi internal untuk peningkatan kompetensi petugas	2023
2.	Help desk untuk pelaku usaha terkait sharing knowledge dan Implementasi GMP dan Desk CAPA		Pemberian informasi kepada pelaku usaha melalui layanan publik dan Desk CAPA baik secara daring atau luring	Triwulan III dan IV tahun 2023
3.	Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.		Pertemuan dengan lintas sektor terkait penyampaian dan evaluasi hasil pengawasan Obat dan Makanan lebih efektif	Triwulan IV Tahun 2023

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

5. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

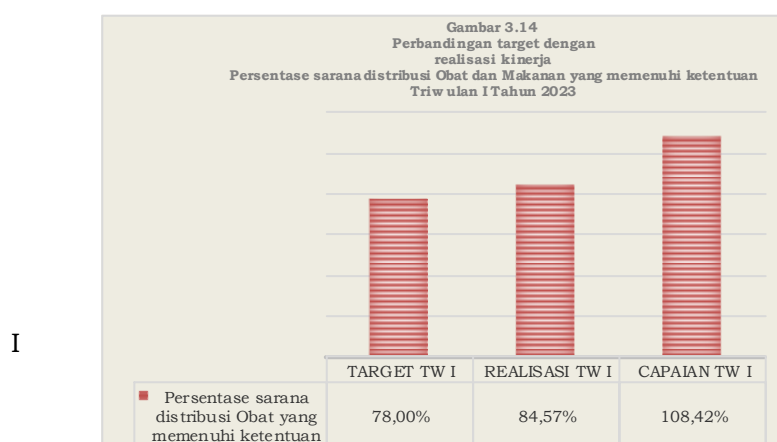
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan I tahun 2023 dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa pada Triwulan I tahun 2023.



TABEL 3.23
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	78.00%	84.57%	108.42%	Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



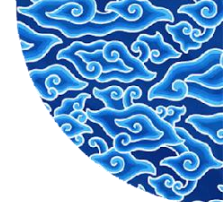
Target Triwulan I tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 78,00%. Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan tahun 2023 sebesar 84,57%. Dengan demikian persentase

capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **108,42%** dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi (Efektif)**. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 296 sarana dari 350 sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Target Triwulan I tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 78,00%. Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 84,57%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **108,42%** dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi**. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 296 sarana dari 350 sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis indikator ini adalah sebesar 78%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 108,42%.





C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan dan peningkatan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Pemenuhan kepatuhan GDP sarana distribusi obat dan makanan sudah memadai.
- Pelaksanaan jadwal pemeriksaan sarana sesuai perencanaan.
- Telah dilaksanakan upaya pembinaan kepada pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana distribusi. Pada tanggal 31 Maret dilakukan pembinaan berupa pemanggilan kepada sarana distribusi obat tradisional yang menjual produk tanpa izin edar
- Peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Bandung dengan mengikuti pelatihan antara lain mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di Bandung pada tanggal 16-17 Februari 2023
- Adanya kegiatan desk CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan di sarana pelayanan kefarmasian pada tanggal 29 dan 30 Maret 2023 sebanyak 8 sarana

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dan Organisasi Profesi untuk meningkatkan kesadaran penanggung jawab pengelola obat di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan pedoman teknis pengelolaan obat yang baik.
- Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop atau bimtek mengenai CDOB, SMKPO dan BUPN/Importir kosmetik.
- Sosialisasi, bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait GDP.
- Membangun database Hasil Pemeriksaan Sarana untuk memudahkan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2023 sebagai berikut:



- Pembuatan perencanaan pemeriksaan sarana produksi berdasarkan skala prioritas hasil dari analisis resiko.
- Melaksanakan pelatihan CDOB bekerjasama dengan PD IAI Provinsi Jawa Barat
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan terhadap pemeriksaan sarana. Dan di setiap minggu dilakukan monitoring capaian melalui google drive koordinasi jadwal dinas. (Sesuai Gambar 3.5)
- Desk CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menindaklanjuti temuan tersebut. (Sesuai Gambar 3.6)

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.24
 MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
 “PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
 YANG MEMENUHI KETENTUAN”

Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.	Pembinaan kepada pelaku usaha distribusi pangan setiap kali dilakukan pemeriksaan sarana	Pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha sarana distribusi baik secara daring ataupun luring	Des 2023
2.	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.	Melaksanakan desk CAPA untuk sarana distribusi pelayanan kefarmasian sebanyak 8 sarana tanggal 29 dan 30 Maret 2023	Monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) untuk sarana distribusi	Des 2023
3.	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan serta kemudahan dalam penyampaian CAPA melalui email kantor.	• Monitoring dan evaluasi penyampaian CAPA yang disampaikan melalui email secara berkala	• Monitoring dan evaluasi penyampaian CAPA yang disampaikan melalui email corporate dan email tertentu secara berkala • Menyampaikan surat permintaan CAPA pada 17 sarana	Triwulan II, III dan IV tahun 2023
4. d	Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dan Organisasi	• Bekerjasama dengan PD IAI Jabar dalam rangka pelatihan CDOB secara daring yang diselenggarakan dalam 7 sesi. Sesi pertama dilaksanakan	Pelatihan CDOB bekerja sama dengan PD IAI	Triwulan II dan III tahun 2023

Rekomendasi		Tindaklanjuti		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	Profesi untuk meningkatkan kesadaran penanggung jawab pengelola obat di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan pedoman teknis pengelolaan obat yang baik.	tanggal 21 Maret 2023		
5.	Peningkatan Kompetensi Petugas	Mengikuti sosialisasi dan bimtek yang diadakan oleh Badan POM	Mengikuti sosialisasi dan bimtek yang diadakan oleh Badan POM	Triwulan II, III dan IV tahun 2023

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

6. INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: (1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); (2) Profesionalitas SDM (18%); (3) Sarana Prasarana (15%); (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); (5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); (6) Inovasi (7%). Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama). Dengan Kategori nilai sebagai berikut:

TABEL 3.19
KATEGORI PENILAIAN INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C -	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B -	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A -	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima



7. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diukur dengan membandingkan jumlah UMKM yang memenuhi standar dengan jumlah UMKM yang sedang didampingi pada tahun berjalan. UMKM yang didampingi mencakup UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional. Adapun ruang lingkup UMKM-nya adalah sebagai berikut : (1) UMKM pangan mencakup skala usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin edar atau PIRT yang akan naik kelas ke MD; (2) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: a) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, b) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, c) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up), d) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap, e) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor; dan (3) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) dan yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Sedangkan kriteria UMKM yang memenuhi standar adalah: 1) UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai ; 2) UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; 3) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: a) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B) b) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); c) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); d) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.



TABEL 3.25
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAAN TW I	KRITERIA	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	20,00%	10,00%	50%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 79% untuk jumlah UMKM yang memenuhi standar. Sedangkan penilaian terhadap capaian triwulan adalah untuk tahapan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan. Pada TW 1 di tahun 2023, target untuk TW 1 adalah sebesar 20% untuk tahapan kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM pada TW 1 adalah 10,00%. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi dan pelaksanaan bimtek UMKM pangan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **50 %** dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

TABEL 3.26
TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN, KOSMETIK DAN OT

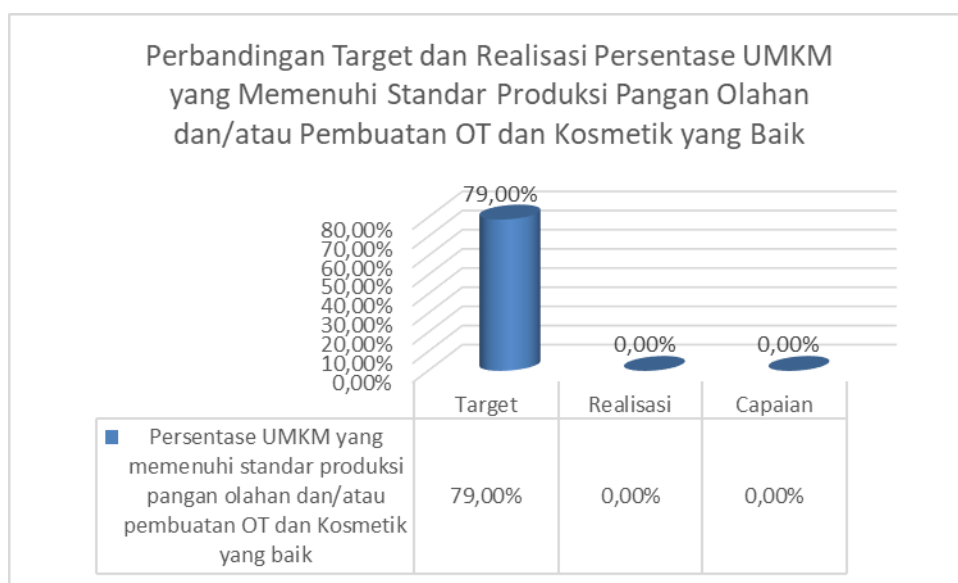
Obat Tradisional		TAHAPAN	Bobot	Bobot Kumulatif	Target Pelaksanaan	Jumlah 4
	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Januari-Februari	
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April	
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	70%	Maret-Oktober	
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-November	
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan	
	Total Progres					
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari-Maret	Jumlah 7
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret	
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November	

	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November	
Total Progres						
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	Jumlah 21
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei	
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September	
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November	
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember	

TABEL 3.27
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN,
OT DAN KOSMETIK
TRIWULAN I TAHUN 2023

No.	Komoditi	Jumlah UMKM Yang Didampingi	Penetapan UMKM	Bimtek UMKM	% tahapan kegiatan pendampingan
1	Pangan	21	10%	0%	3,33%
2	Obat Tradisional	2	10%	0%	3,33%
3	Kosmetik	7	10%	0%	3,33%
TOTAL					10,00%

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I, II, III DAN TRIWULAN IV TAHUN 2023



Gambar 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik



Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 79% untuk jumlah UMKM yang memenuhi standar. Sedangkan penilaian terhadap capaian triwulan adalah untuk tahapan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan.

Pada TW 1 di tahun 2023, target untuk TW 1 adalah sebesar 20% untuk tahapan kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM pada TW 1 adalah 10,00%. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi dan pelaksanaan bimtek UMKM pangan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **50 %**.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 79,00%. Untuk target akhir (UMKM yang memenuhi standar) realisasi di TW 1 masih 0% karena baru dilaksanakan tahapan awal pendampingan, yaitu penetapan targer sarana yang akan didampingi di tahun 2023. Sedangkan untuk tahapan kegiatannya, pada TW 1 telah dilaksanakan 20,00%, jika realisasi kinerja pada triwulan I sebesar 10% dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 500%.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar pada triwulan I tahun 2023 belum memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut :

- ☛ Pada TW 1 tahun 2023, baru dilakukan penetapan UMKM yang akan didampingi.
- ☛ Dalam menetapkan sarana UMKM yang akan didampingi, BBPOM Bandung melakukan rekrutmen terbuka bagi semua UMKM yang berkomitmen untuk ingin mendapatkan izin edar, rekrutmen terbuka ini diumumkan di media sosial. Selain itu, BBPOM Bandung berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan usulan dan masukan pelaku usaha mana yang akan difasilitasi. Di awal proses ini lintas sektor tersebut akan mencari UMKM binaannya dan menyeleksi UMKM mana yang dicalonkan sebagai UMKM yang akan difasilitasi.



Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ✎ Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis untuk mendukung kegiatan pendampingan UMKM sebagai fasilitator.
- ✎ Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- ✎ Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.
- ✎ Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM.
- ✎ Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

- ✎ Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang tahapan proses perizinan berusaha, termasuk proses perizinan yang berlaku di Badan POM. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam hal tata cara dan prosedur perizinan yang bertujuan untuk memberikan adanya kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha.
- ✎ Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur tentang kemudahan untuk UMKM.
- ✎ Terbitnya PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, yang merupakan perubahan atas penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan menjadi izin penerapan CPPOB yang memudahkan pelaku UMKM pangan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penerapan CPPOB untuk sarana produksinya sehingga UMKM Pangan tersebut dapat melanjutkan proses registrasi pangan.
- ✎ Adanya Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika, mempercepat waktu pemenuhan (time line) dikeluarkannya rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika.
- ✎ Adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Kosmetika Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan



Makanan Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Cara Kosmetika Yang Baik.

- ✎ Adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
- ✎ Adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap.
- ✎ Adanya Keputusan Kepala Badan POM Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Bagi Usaha Mikro dan Kecil Pangan Olahan
- ✎ Berbagai Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

- ✎ Pada tanggal 17 Januari 2022 dilaksanakan Bimtek dan Desk CAPA Bagi UMKM yang merupakan kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan adanya yang merupakan salah satu kegiatan pendampingan bagi UMKM yang dilakukan oleh BBPOM. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan materi terkait Penerapan Prinsip CPPOB pada Industri/UMKM Pangan Olahan, Pendaftaran Akun dan Dokumen Panduan Mutu, Pemaparan Materi Panduan Mutu Butir 1 -10, Alur Proses Produksi dan Pengendalian Proses, kemudian dilanjutkan dengan Desk Akun E-Sertifikasi dan Desk Penyusunan SOP antara pelaku usaha dengan Evaluator. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu para pelaku usaha untuk menyiapkan dokumen panduan mutu yang dipersyaratkan pada saat mengajukan permohonan ijin penerapan CPPOB sehingga mereka dapat mengupload dokumen tersebut dan mulai berproses di sistem/aplikasi e-sertifikasi. Bimtek ini merupakan salah satu kegiatan inovasi BBPOM Bandung, yaitu dalam rangka Booster UMKM Juara, namun tidak termasuk dalam tahapan kegiatan fasilitasi yang telah ditetapkan karena pada TW 1 tahapan yang dilaksanakan adalah penetapan target sarana UMKM yang akan difasilitasi/didampingi pada tahun 2023. Sementara untuk tahapan Bimtek untuk UMKM yang akan didampingi tersebut telah dijadwalkan untuk dapat dilaksanakan di awapendampingan 1 TW 2.





Gambar 3.11 Bimtek dan Evaluasi Desk CAPA Bagi Pelaku UMKM

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

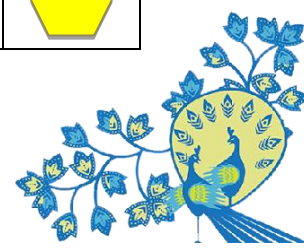
SASARAN KEGIATAN KE-5

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **92,54%** dengan kriteria **Baik**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.23.

TABEL 3.28
 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-5
 TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,70	95,84	100,15	MEMENUHI EKSPEKTASI	
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20,00	15,00	75,00	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	
3. Jumlah desa pangan aman	15,00	15,00	100,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	
4. Jumlah pasar pangan berbasis komunitas	20,00	19,00	95,00	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	



INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			92,54%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI 

1. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: (a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; (c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; (d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester.

Penetapan hasil pengukuran indikator tersebut pada triwulan I, berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor: HM.11.02.2.22.04.23.299 Tanggal 11 April 2023 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 1 tahun 2023.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4(empat) aspek KIE yang terdiri dari: (1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; (3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan (4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan. Kategori penilaian yang digunakan pada tahun sebagai berikut:

TABEL 3.29
KATEGORI PENILAIAN
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2023

SKOR INDEKS 100	INTERPRESTASI EFEKTIFITAS
<65.00	Kurang Efektif
65.01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif



95.01 – 100

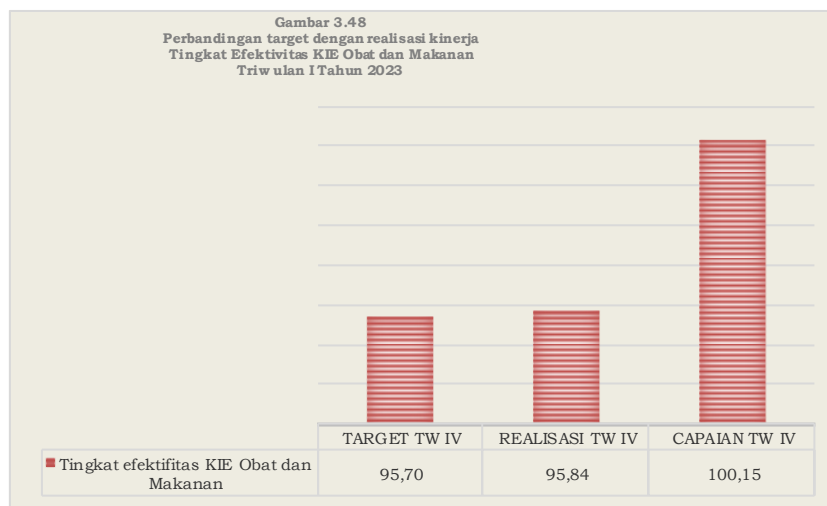
Sangat Efektif Sekali

TABEL 3.30
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,7	95,84	100,15%	MEMENUHI EKSPEKTASI	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2023 adalah sebesar 95,7. Realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada



Triwulan I tahun 2023 sebesar 95,84 (Sangat Efektif Sekali) diatas Target Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut

adalah sebesar **100,15%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 95,7. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan IV sebesar **100,15%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:
 Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yaitu:



1. Melakukan KIE melalui sosial media infografis baik di Facebook maupun Instagram
2. Melakukan KIE melalui IG Live Kelom Geulis (Kenalan Dengan BBPOM Bandung Berbagi Edukasi dan Informasi Sae Pisan)
3. Melakukan KIE berupa Webinar Warta POPA (Berita Peduli Obat dan Pangan Aman) yang dilakukan secara online
4. Melakukan KIE bekerjasama dengan pihak radio Raka dan Sonora berupa Iklan Layanan Masyarakat (ILM)
5. KIE bekerjasama dengan tokoh masyarakat
6. KIE bekerjasama dengan pramuka



KIE IG Live Kelom Geulis



KIE Infografis pada Medsos



Narsum Pada Media Siar

KIE bekerjasama dengan pramuka





KIE bekerjasama dengan tokoh masyarakat

Gambar 3.10

Kegiatan KIE yang telah diselenggarakan oleh BBPOM di Bandung

D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Selain itu, rekomendasi yang disampaikan untuk ditindaklanjuti terkait pelaksanaan pengukuran Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di tahun 2022 yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda.
- Melakukan evaluasi dan Analisa terhadap hasil pengukuran masing-masing, untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.
- Melakukan koordinasi dengan Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi apabila ada kendala dalam penggunaan aplikasi Evaluasi KIE.

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan cakupan KIE yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lintas sektor/Lembaga lain
- Melaksanakan KIE melalui Webinar Warta POPA tentang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha maupun masyarakat luas.
- Menjaga Konsistensi kegiatan melalui Media sosial

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



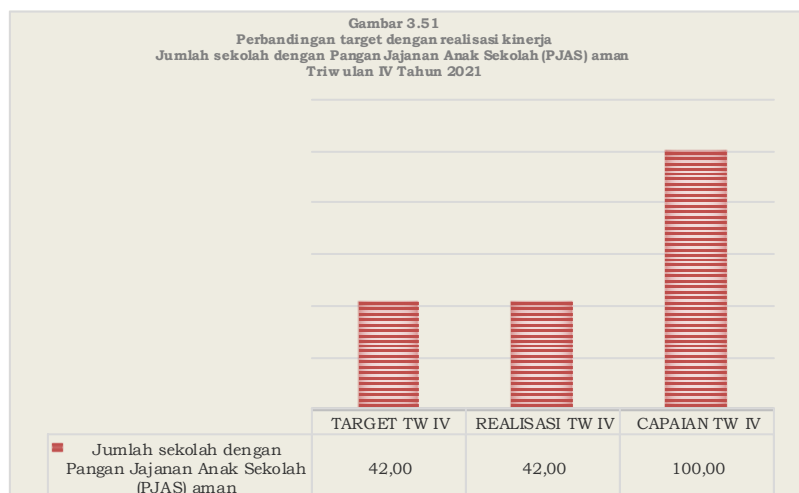
2. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman diukur berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Petunjuk Teknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.

TABEL 3.31
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH SEKOLAH DENGAN
PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW 1	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20 % Proses	20 % Proses	100,00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2023 adalah 112 sekolah. Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2021 adalah progress 20%. Pada triwulan I, realisasi indikator sasaran kegiatan

tersebut sebesar progress 20%, dimana tahap Advokasi kepada Pemerintah Daerah sudah dapat diselesaikan. Jika diukur terhadap target triwulan I maka capaiannya sebesar **100,00%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Intervensi yang dilakukan bertahap sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan POM RI. Tahap kegiatan PJAS yang dilaksanakan adalah Advokasi dengan lintas sector, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan di Sekolah dan Workshop Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan di 112 sekolah di Kabupaten Sukabumi, Kab Bekasi, Kab



Garut, dan Kota Cimahi. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan PJAS dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.32
RENLAK DAN MONEV PELAKSANAAN KEGIATAN PJAS TAHUN 2023

KEGIATAN		PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS sd TW 1
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Adokasi Lintas Sektor PJAS	20	20	0	0	0	20
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	5	0	0	0	0	0
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15	0	0	0	0	0
4	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10	0	0	0	0	0
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya)			0	0	0	
	• Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5	0	0	0	0	0
	• Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10	0	0	0	0	0
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15	0	0	0	0	0
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1 (Tahun 2020 dan 2021)	20	0	0	0	0	0
TOTAL SKOR		100	20	0	0	0	20

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 112 sekolah (target progress pada TW 1 adalah 20%). Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **100,00%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I 2023 adalah sebagai berikut:

- Melakukan audiensi mengenai Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan kepada Kab Sukabumi, Kab Bekasi, Kab Garut dan Kota Cimahi yang di tindaklanjuti dengan pelaksanaan Advokasi terkait kegiatan dengan OPD Kab Kota tersebut





Gambar 3.11
Kegiatan Advokasi Keamanan Pangan

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pada periode sebelumnya adalah:

- Melakukan moneyv terhadap setiap tahapan progress Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindaklanjut sebagai berikut:

- Pada periode triwulan I telah dilakukan moneyv dan pelaksanaan tepat sesuai dengan perencanaan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Jumlah desa pangan aman diukur berdasarkan jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain. Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Pangan Aman: (1) Advokasi Kelembagaan Desa; (2) Bimtek Kader Pembentukan Desa Pangan Aman; (3) Bimtek Komunitas; (4) Fasilitasi Keamanan Pangan; (5) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan; (6) Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Desa Pangan; (7) Lomba Desa; dan (8) Pengawasan. Hasil dari keseluruhan proses Audiensi dan Advokasi dengan pihak Pemda Kab/Kota yg diintervensi, Desa yang diintervensi meliputi 3 desa di Kabupaten Sukabumi yaitu Desa Kompa, Sukaraja dan Pasir Halang, 2 desa

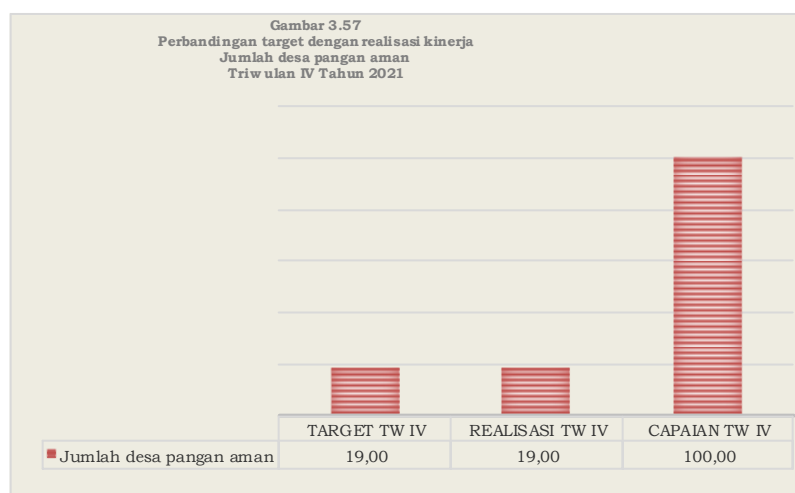


di Kabupaten Garut yaitu Desa Neglasari dan Giri Makmur; 2 desa di Kabupaten Bekasi yaitu Desa Kertarahayu dan Ciantra; 2 Kelurahan di Cimahi yaitu Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Leuwi Gajah

TABEL 3.33
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH DESA PANGAN AMAN”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah desa pangan aman	20 % Proses	20 % Proses	100%	MEMENUHI EKSPEKTASI	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

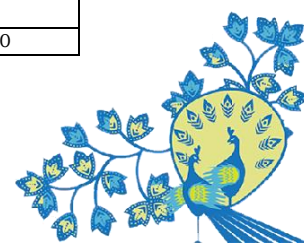


Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2023 adalah 37 Desa. Target yang ditetapkan pada Triwulan I

tahun 2023 adalah progress 20%. Pada triwulan I, realisasi indikator sasaran kegiatan tersebut sebesar progress 20% Progress . Jika diukur terhadap target triwulan I maka capaiannya sebesar **100,00%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.34
PROGRESS PELAKSANAAN DESA PANGAN AMAN
SD TAHUN 2023

KEGIATAN		PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRESS (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20	20	0	0	0	20
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5	0	0	0	0	0
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15	0	0	0	0	0
4	Bimtek Komunitas	15	0	0	0	0	0



5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10	0	0	0	0	0
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10	0	0	0	0	0
7	Monitoring dan Evaluasi	15	0	0	0	0	0
8	Pengawasan tahun sebelumnya	10	0	0	0	0	0
TOTAL SKOR		100	20	0	0	0	20

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar progress 20%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **100,00%** dengan kriteria **Baik**.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebahagiaan pencapaian sasaran kinerja ini disebabkan karena :

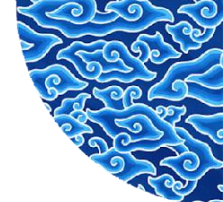
- Telah dilakukan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut
- Anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan
- Dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program Desa Pangan Aman yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan tahap Audiensi dan Advokasi kepada pemerintah daerah Kab Sukabumi, Kab Bekasi, Kab Garut dan Kota Cimahi. Secara umum seluruh tahapan Advokasi berjalan sesuai perencanaan. Ada hambatan saat Audiensi Kab Bekasi dimana Bupati Bekasi yang menyatakan antusias terhadap program ini dan bermaksud akan menerima secara langsung tim dari BBPOM Bandung saat beraudiensi. Sehingga jadwal audiensi agak sulit menyesuaikan dengan jadwal Bupati Bekasi yang cukup padat, meskipun pada akhirnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, dimana tim BBPOM Bandung diterima langsung oleh Bupati Bekasi
- Perencanaan dan Monev yang ketat terhadap pelaksanaan program secara konsisten dilakukan untuk memastikan lancarnya program ini
- Dukungan dari Pemda Kab/Kota yang diintervensi terhadap kegiatan ini.





E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

4. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN

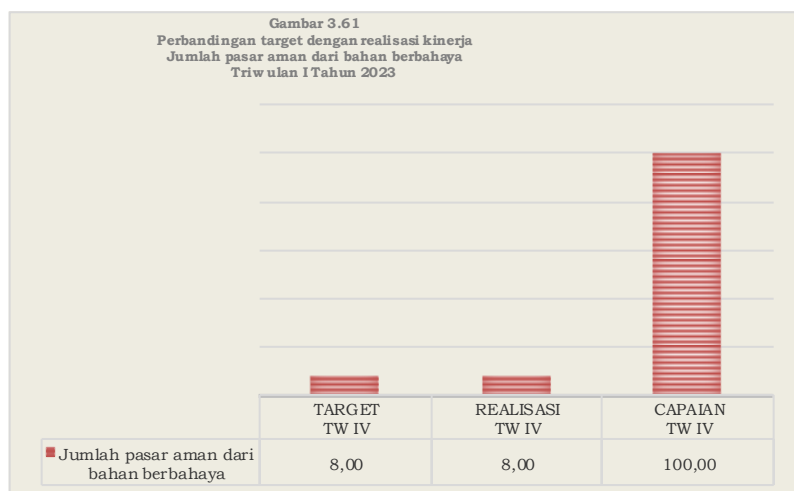
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya diukur berdasarkan jumlah pasar yang mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, mengalami penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang mendapat intervensi adalah Pasar Sukaraja dan Pasar Parung Kuda di Kab Sukabumi, Pasar Baraya Desa di Kab Garut, Pasar Tambun Kab. Bekasi, dan Pasar Atas di Kota Cimahi.

TABEL 3.34
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
 “JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA”
 TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20 % Proses	20 % Proses	100,00%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023





Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2031 adalah 5 pasar. Target yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2023 adalah progress 20%.

Pada triwulan I, realisasi indikator sasaran kegiatan tersebut sebesar 20% Proses. Jika diukur terhadap target triwulan I maka capaiannya sebesar **100%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.35
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR AMAN
DARI BAHAN BERBAHAYA
SD TRIWULAN I TAHUN 2023

KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1 Advokasi	20	20	0	0	0	20
2 Survey Pasar	5	0	0	0	0	0
3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15	0	0	0	0	0
4 Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (Tahun N dan Pengawasan Tahun Sebelumnya)	15	0	0	0	0	0
5 Penyuluhan	10	0	0	0	0	0
6 Kampanye	10	0	0	0	0	0
7 Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	15	0	0	0	0	0
8 Pengawasan Pasar Aman	10	0	0	0	0	0
TOTAL SKOR	100	20	0	0	0	20

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 5 Pasar (progress 20%). Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **100,00%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN



Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini disebabkan karena :

- Telah dilakukan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut
- Anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan
- Dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program Pasar Pangan Aman yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan tahap Audiensi dan Advokasi kepada pemerintah daerah Kab Sukabumi, Kab Bekasi, Kab Garut dan Kota Cimahi. Secara umum seluruh tahapan Advokasi berjalan sesuai perencanaan. Ada hambatan saat Audiensi Kab Bekasi dimana Bupati Bekasi yang menyatakan antusias terhadap program ini dan bermaksud akan menerima secara langsung tim dari BBPOM Bandung saat beraudiensi. Sehingga jadwal audiensi agak sulit menyesuaikan dengan jadwal Bupati Bekasi yang cukup padat, meskipun pada akhirnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, dimana tim BBPOM Bandung diterima langsung oleh Bupati Bekasi
- Perencanaan dan Monev yang ketat terhadap pelaksanaan program secara konsisten dilakukan untuk memastikan lancarnya program ini
- Dukungan dari Pemda Kab/Kota yang diintervensi terhadap kegiatan ini.
- Pelaksanaan tahapan kegiatan Pasar Aman akan dilaksanakan dengan menerapkan standar protocol Kesehatan yang ketat sehingga terlaksana 100%. Melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder untuk melakukan intervensi ke pedagang, pembeli di pasar, sehingga pasar yang diintervensi bisa menerapkan secara mandiri program pasar aman dari bahan berbahaya.
- Melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder untuk melakukan intervensi ke pedagang, pembeli di pasar, sehingga pasar yang diintervensi bisa menerapkan secara mandiri program pasar aman dari bahan berbahaya serta dapat direplikasi oleh pasar lainnya di Kabupaten setempat dan bisa masuk nominasi Lomba Pasar Aman 2023.

B. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun. Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **190,00%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.36
 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6
 TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	20,00%	17,21%	86,05%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	22,00%	21,25%	96,61%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			91,33%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	

1. PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Obat dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100%.

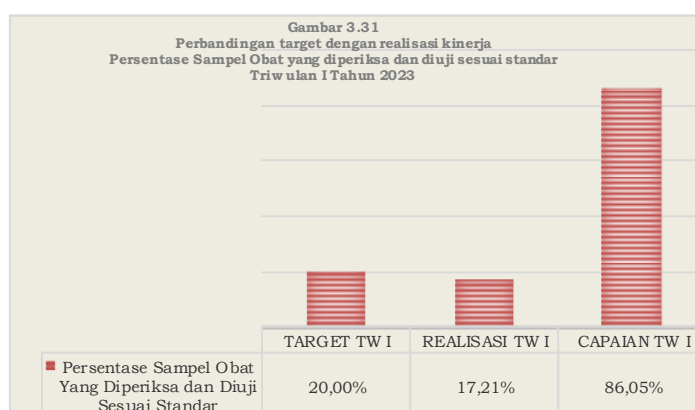
Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.



TABEL 3.37
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI
STANDAR”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	20,00%	17,21%	86,05%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



Pada triwulan I, jumlah sampel obat yang disampling 556 sampel dan jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 2548 sampel dan sampel obat yang diuji sesuai standar sebanyak 442 sampel dari

target sampel obat yang diuji 3402 sampel. Dari data tersebut, diperoleh nilai persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 17,41%. Target pada triwulan I yang telah ditetapkan sebesar 20,00%, dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **87,02%** dengan Kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

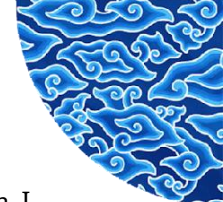
Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 17,21%.

C. ANALISIS KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Ketidakberhasilan pencapaian pada triwulan I tahun 2023 ini disebabkan oleh:

- Target yang ditetapkan utk sampel yang diperiksa adalah 25,00% dan realisasinya sebesar 21,82% (556 sampel dari 2548 sampel yang ditargetkan).





Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan pada triwulan I adalah 15,00% dan realisasinya mencapai 12,99% (442 sampel dari 3402 sampel yang diuji). Capaian sampel diperiksa maupun diuji sesuai standar belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pada awal tahun, yaitu pada bulan Januari 2023 belum dilakukan sampling untuk komoditi Kosmetik dan pada bulan Februari 2023 baru masuk laboratorium pada pertengahan bulan. Sehingga capaian sampel selesai uji masih sedikit.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023, antara lain:

- Review target triwulan untuk indikator kinerja ini.
- Koordinasi sampling yang melibatkan fungsi pemeriksaan, Koordinator regionalisasi region 3 (BBPOM di DKI Jakarta) dan fungsi pengujian yang lebih baik, sehingga pemecahan permasalahan atau kendala yang terjadi pada saat proses sampling di lapangan dapat berjalan optimal.
- Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.

Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang ketidakberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

- Sampling yang terlambat khususnya komoditi kosmetik yang mulai disampling di pertengahan bulan Februari 2023.

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung seperti peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan, belum dilakukan pada triwulan I tahun 2023.



F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tabel 3.38
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
a	Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP tahun 2022 adalah 75,80%	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP sampai dengan tahun 2023	Desember 2023
b	Terjadi antrian alat karena pemenuhan peralatan yang masih kurang sehingga dilakukan penyesuaian dengan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.	Telah dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji terutama peralatan utama yang dipakai beberapa laboratorium sekaligus seperti GCMS yang dipakai oleh Laboratorium Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan	Masih dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat karena pemenuhan peralatan sesuai standar masih belum terpenuhi	Desember 2023
c	Meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis personil pengujian melalui pelatihan dan webinar, Bimbingan Teknis Internal. Dengan adanya pelatihan dan webinar ini meningkatkan pengetahuan dari personel penguji kimia pangan.	Telah dilakukan peningkatan kompetensi teknis pengujian pada triwulan IV tahun 2023	Dilakukan perencanaan peningkatan kompetensi teknis pengujian, seperti bimbingan teknis internal laboratorium tahun 2023 dan peningkatan kompetensi personal laboratorium di P3OMN	Desember 2023
d	Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.	Monev timeline pengujian obat tahun 2022	Monev timeline pengujian obat Tahun 2023	Desember 2023

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dan



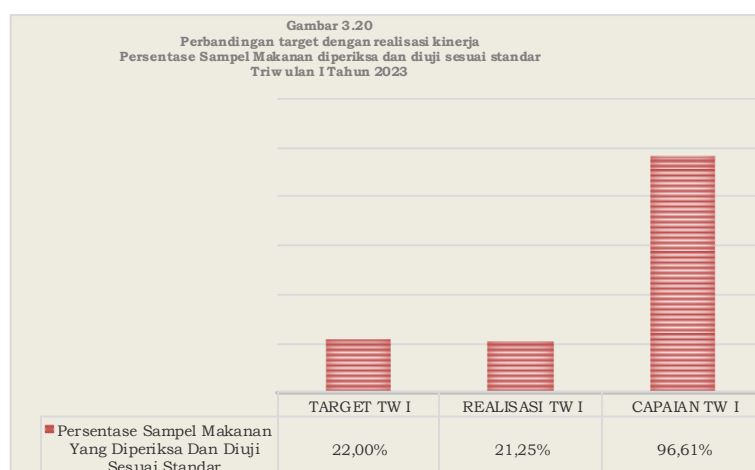
persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Makanan dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100%.

Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

TABEL 3.39
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA
DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	20,00%	21,25%	106,25%	Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



Pada triwulan I tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 20,00%. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun

2023 sebesar 21,25% dengan rincian jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebesar 26,52% (sebanyak 287 sampel dibandingkan terhadap jumlah target sampel Makanan yang diperiksa sebanyak 1082 sampel) dan jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebesar 15,98% (sebanyak 249 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Makanan yang diuji sebanyak 1558 sampel). Dengan demikian realisasi TW 1 sebesar 21,25 % dengan



demikian capaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar 96,61 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I sebesar 21,25 % yang dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 21,25%.

C. ANALISIS KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Kebhasilan pencapaian pada triwulan I tahun 2023 ini disebabkan oleh:

- Perencanaan sampling dilaksanakan sesuai jadwal.
- Sampai dengan triwulan I tahun 2023 hasil pengujian sampel makanan yang diperiksa dan diuji baru 15,98 % (249 sampel dari total 1558 sampel) sehingga belum menggambarkan hasil pengujian secara keseluruhan

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2023, antara lain :

- Review target triwulan untuk indikator kinerja ini
- Koordinasi sampling yang melibatkan fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian yang lebih baik, sehingga pemecahan permasalahan atau kendala yang terjadi pada saat proses sampling di lapangan dapat berjalan optimal.
- Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung



adalah peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan, kalibrasi/verifikasi peralatan laboratorium, jaminan mutu hasil pengujian melalui uji validasi dan verifikasi metode analisa.

- Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Monev Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung dan dihadiri oleh seluruh Koordinator yang diselenggarakan secara Luring dan Daring.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindakan lanjut yang telah dilakukan berdasarkan rekomendasi tersebut :

- Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.
- Telah dilakukan peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

SASARAN KEGIATAN KE-7

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung. Dari perhitungan 1 (satu) indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **98,93%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.40.



TABEL 3.40
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-7
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,00%	21,76%	98,93%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			98,93%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	

PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undang di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); (b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)); (c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dan (d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro legal berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

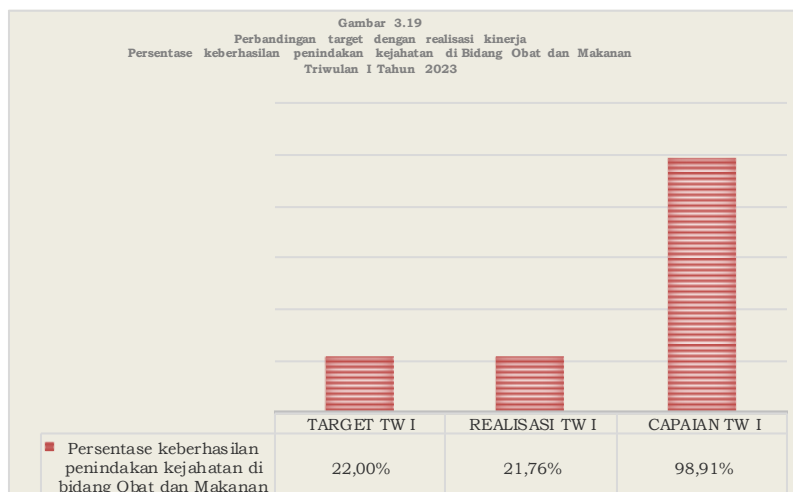
- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



Pada triwulan I tahun 2023, target yang ditetapkan pada illegal a sasaran kegiatan ini adalah sebesar 22,00%. Realisasi kinerja untuk sasaran kegiatan ke-7 sebesar 21,76%

sehingga capaian sasaran kegiatan ke-7 sebesar **98,93%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

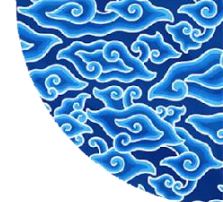
D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAS KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan/penurunan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2023 disebabkan antara lain:

Penurunan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- Masa transisi kepeimimpinan menggunakan metode illegal al menjadi ketua tim berdampak pada perubahan ritme kerja dan kecepatan mengambil keputusan
- Adanya perubahan modus operandi kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang semakin berkembang antara lain: maraknya penjualan produk illegal secara online, banyaknya jumlah sarana produksi dan sarana distribusi, jam operasional yang tidak menentu/acak menyebabkan banyaknya operasi penindakan yang dilakukan tidak berhasil karena tutup, berpindah tempat dan tidak menemukan alat bukti yang cukup.
- Dalam beberapa kegiatan investigasi, hasil kegiatan investigasi tidak cukup dalam pengumpulan bahan keterangan bahkan hasil investigasi tidak ada karena kegiatannya telah diketahui oleh target.
- Penggantian pejabat illegal al di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar dan Polda Metro Jaya menyebabkan perubahan kebijakan dalam proses pelaksanaan bantuan teknis dan taktis yang menghambat kegiatan operasi penindakan dan proses pemberkasan





Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan komunikasi terbatas dalam penentuan target investigasi dan operasi penindakan serta melakukan rotasi atau penggantian terhadap petugas yang bertugas dalam pembuatan surat perintah tugas investigasi dan surat perintah operasi penindakan
- Memaksimalkan investigasi atau penelusuran kasus yang didasarkan pelaporan dari masyarakat melalui infokom dan diteruskan ke kelompok subatansi penindakan sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara dari pelaporan tersebut.
- Membangun jejaring informasi secara berkelanjutan tentang kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang terjadi di wilayah Jawa Barat
- Melakukan koordinasi dengan pejabat di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar dan Metro Jaya untuk membuat kesepakatan dalam proses pelaksanaan bantuan teknis dan taktis sehingga dapat menunjang kegiatan operasi penindakan dan proses pemberkasan
- Melakukan koordinasi dengan Direktorat Intelijen BPOM dan pihak terkait lain mengenai tindak lanjut dari Patroli Siber yg sudah dilakukan agar dapat mengungkap informasi penjualan produk ilegal secara *online*.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

Dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan ke-7, yaitu: “Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandung” dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Penyidikan obat dan makanan; dan (2) Dukungan Teknis Investigasi Awal di Bidang Obat dan Makanan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi Balai Besar POM di Bandung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, yaitu: Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- Penyidikan Obat dan Makanan



Pada Triwulan 1 tahun 2023, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditangani sebanyak 1 perkara yang dilakukan proses projusticia. Sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Perkara yg ditangani Bidang Penindakan terdiri dari 1 perkara produksi tanpa izin edar di Wilayah Kabupaten Bekasi. Proses penyidikan atas 1 perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan masih berlanjut dan diharapkan dapat selesai tahap 2 di tahun berjalan.



Gambar 3.12 Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan

- Investigasi Awal

Kegiatan investigasi awal adalah kegiatan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi dari masyarakat, temuan hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat melalui Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi berdasarkan surat dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online. Kegiatan investigasi awal yang dilakukan pada triwulan 1 tahun 2023 terhadap 12 sarana, namun hanya 3 sarana yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Dari jumlah tersebut, 1 sarana ditindaklanjuti dengan kegiatan penindakan dengan output kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan sebanyak 1 kasus Pro-justitia ditangani Balai Besar POM di Bandung.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Rekomendasi untuk pencapaian sasaran ini pada tahun sebelumnya dan rekomendasi tahun 2023 bertumpu pada peningkatan kualitas SDM terkait penyidikan obat dan makanan serta peningkatan koordinasi lintas sektor khususnya dengan *Criminal Justice System (CJS)*.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada triwulan 1 tahun 2023 terhadap rekomendasi yang telah diberikan antara lain:



- Peningkatan kompetensi SDM baik dari segi kompetensi teknis ataupun manajerial yang telah dilaksanakan Balai Besar POM di Bandung. Penunjukan peserta disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi staf untuk memperkecil perbedaan/gap kompetensi masing-masing individu. Beberapa kegiatan peningkatan kompetensi SDM yg sudah dilaksanakan di Triwulan 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.41

Data Peningkatan Kompetensi Penindakan

No	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Patroli Siber	16 Februari 2023	- J. P. Putra, S.Farm., M.Si
2	Pelatihan Pengungkapan Kejahatan	28 Februari sd 28 Maret 2023	- A. M. Sidik., S.Si., Apt., M.H.

- Selain kegiatan diatas, ada beberapa kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan mulai dari Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor pada saat akan, selama dan setelah proses penindakan dilaksanakan secara intensif terutama dengan Korwas PPNS POLDA Jabar dan Jaksa Penuntut Umum, baik untuk percepatan penyelesaian berkas perkara ataupun dalamantisipasi untuk menghindari adanya pra peradilan perkara yang ditangani penyidik Balai Besar POM di Bandung.
- Peningkatan koordinasi dengan Kejati Jabar selain dalam proses pemberkasan juga melibatkan instansi tersebut dalam kegiatan operasi penindakan untuk membantu penyamaan pemahaman dalam kegiatan pemberkasan yang dilakukan oleh PPNS BBPOM di Bandung.
- Peningkatan koordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda Jabar dalam kegiatan operasi penindakan guna menunjang bantuan teknis penindakan selain yang dilakukan oleh Korwas Polda Jabar
- Pelaksanaan Penggalangan bertemakan “Jabar Juara Bebas dari Penyalahgunaan Obat” yang telah dilaksanakan pada 09 Maret 2023 yang dihadiri Polda Jabar, BNN Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta turut mengundang Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Kedeputan Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat , Kepolisian Daerah Metro Jaya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri

Bandung, Rupbasan Kelas 1 Bandung, Kantor Wilayah Bea Cukai Provinsi Jawa Barat, Loka POM di Kabupaten Bogor, Loka POM di Kota Tasikmalaya, Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Jawa Barat, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP-Farmasi) Provinsi Jawa Barat, Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP-Jamu) Provinsi Jawa Barat, Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) Provinsi Jawa Barat, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Provinsi Jawa Barat, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aperindo) Provinsi Jawa Barat dan stakeholder lain



Gambar. 3.13 Kegiatan Penggalangan “Jabar Juara Bebas dari Penyalahgunaan Obat” 09 Maret 2023

- Pemusnahan Hasil Pengawasan dan Penindakan Obat dan Makanan Ilegal di PT. Jasa Medivest pada tanggal 09 Maret 2023 total produk yang dimusnahkan berjumlah 175.621 pcs senilai Rp. 28.939.658.504 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Obat : 150 item, 2.322 pieces, nilai ekonomi Rp. 639.898.004,-
 - b. Obat Tradisional : 93 item, 144.526 pieces, nilai ekonomi Rp. 5.852.160.000,-
 - c. Pangan : 2 item, 5.550 pieces, nilai ekonomi Rp. 2.184.432.500,-
 - d. Kosmetika : 41 item 23.223 pieces, nilai ekonomi Rp. 20.263.168.000,-





Gambar 3.14 Pemusnahan Barang Bukti

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

SASARAN KEGIATAN KE-8

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran. Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen



perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Manajemen Perubahan: bobot 5%; (2) Penataan Tatalaksana: bobot 5%; (3) Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%; (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; (5). Penguatan Pengawasan: bobot 15%; dan (6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%. Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%; (2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

2. INDEKS AKIP BBPOM DI BANDUNG

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator Nilai AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Bandung yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI.



SASARAN
KEGIATAN
KE-9

TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG
BERKINERJA OPTIMAL

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran.

INDEKS PROFESIONAL ASN BBPOM DI BANDUNG

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai; (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan; (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan (4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT yang dipersiapkan oleh Biro Umum dan SDM Badan POM.

Pengukuran IP-ASN tahun 2023 diukur pada akhir Triwulan IV menggunakan aplikasi <https://siasn.pom.go.id/sirensdm/ip-asn>. Namun demikian, berbagai kegiatan tetap dilaksanakan pada Triwulan I untuk meningkatkan realisasi kinerja, antara lain:

- **Kualifikasi Pendidikan:**
Usulan calon peserta tugas belajar dan ijin belajar batch 1 Tahun 2023 ke PPSDM; Monitoring dan Evaluasi Peserta Tugas Belajar secara berkala.
- **Kompetensi:**
Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi serta capaian JP seluruh Pegawai; Pelaksanaan Uji Kompetensi Pegawai Pejabat Fungsional PFM; dan Pemetaan Kompetensi Pejabat Fungsional PFM, Usulan Uji Kompetensi Perencana Pertama dan Madya.
- **Kinerja:**
Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjutnya capaian SKP TW4 tahun 2022; Penyusunan Matriks Peran Hasil, dan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2023 menggunakan aplikasi SIMAKIN



- **Disiplin:**

Pelaporan absen dan kehadiran ke Biro Umum SDM tepat waktu; Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku secara berkala

Diharapkan proses pencapaian kinerja pada akhir tahun sesuai target, dan proses keberhasilan di TW1 dipengaruhi berbagai faktor, antara lain:

- **Kualifikasi Pendidikan:**

BBPOM di Bandung memfasilitasi peserta Tugas Belajar serta Ijin Belajar untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan. Pada tahun 2023 terdapat sejumlah 8 Pegawai sedang menjalani Tugas Belajar dan 2 pegawai Ijin Belajar.

- **Kompetensi:**

Pemenuhan persyaratan target SKP Pengembangan Kompetensi 20 JP untuk seluruh pegawai sangat berpengaruh dalam peningkatan kompetensi. Selain itu, program Uji Kompetensi untuk Pejabat Fungsional, terutama PFM, juga berpengaruh dalam peningkatan Kompetensi Pegawai

- **Kinerja:**

Capaian Kinerja seluruh Pegawai seluruhnya baik berdasarkan Penilaian atasan langsung, sangat dipengaruhi kompetensi manajerial masing-masing atasan

- **Disiplin:**

Pencegahan Pelanggaran Disiplin, melalui sosialisasi Peraturan Disiplin berperan dalam pemahaman dan pelaksanaan Disiplin Pegawai BBPOM di Bandung

Tindak Lanjut terhadap capaian Indeks Profesionalitas ASN adalah mempertahankan dan meneruskan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, serta mengembangkan kegiatan penunjang lainnya seperti Peningkatan Kompetensi untuk Pejabat Fungsional Tertentu selain Pejabat Fungsional PFM.

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



**SASARAN
KEGIATAN
KE-10**

**MENGUATNYA LABORATORIUM PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan 2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal. Namun pada triwulan I, yang diukur hanya Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal. Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran tersebut sebesar **102,86%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.43.

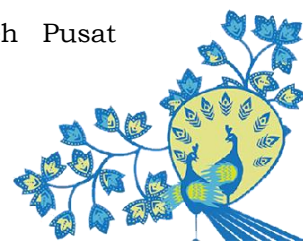
TABEL 3.42
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-10
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	Diukur pada akhir tahun	
2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2,80	2,88	102,86%	MEMENUHI EKSPEKTASI	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			102,86%	MEMENUHI EKSPEKTASI	

1. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM yang berlaku untuk tahun 2020-2024. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat



Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) dengan menggunakan tools penilaian sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Metode penilaian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)
Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP). Hasil Uji Profisiensi yang inlier. Hasil Uji Kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.
2. Penilaian Standar Kompetensi
Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervisi tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.
 - Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat pada Formulir Informasi Kompetensi. Hasil sudah dinyatakan dalam persen (%).
 - Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel.
 - Hasil Rekapitulasi masing-masing Laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.
3. Penilaian Standar Peralatan
 - Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
 - Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.
 - Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

Pada triwulan I, belum dilakukan pengukuran terhadap realisasi kinerja indikator sasaran ini, karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun anggaran 2023. Sampai dengan triwulan I pemenuhan SKL yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Standar Ruang Lingkup: Penambahan kemampuan uji laboratorium kimia obat (penambahan 1 ruang lingkup) dan laboratorium kimia kosmetik (penambahan 1 ruang lingkup).
- 2) Peningkatan Standar Kompetensi: kegiatan bimbingan teknis dan webinar terkait teknis laboratorium untuk meningkatkan pengetahuan personil pengujian.



- 3) Peningkatan Standar Alat Laboratorium: Pada triwulan I telah dibuat rencana pemenuhan penambahan beberapa alat laboratorium untuk meningkatkan alat laboratorium sesuai standar GLP.

2. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

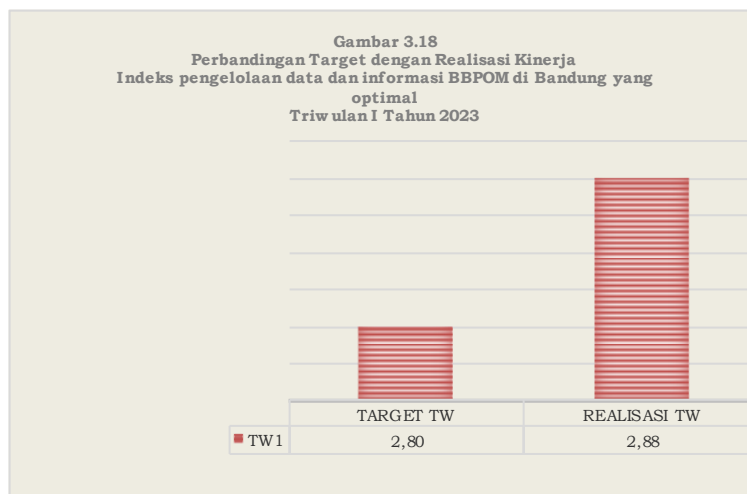
Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: (1). Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di Badan POM Operational Centre (BOC). Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut: SIPT, SPIMKer Data Keracunan. (2). Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

TABEL 3.43
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL”
TRIWULAN I TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2,80	2,88	102,86%	MEMENUHI EKSPEKTASI	



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



Pada triwulan I tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 2,25 sedangkan realisasinya sebesar 1,82. Dengan rincian, pada komponen Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi sebesar 2,25 dan

komponen Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan sebesar 1,4. Sehingga capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **102,86%** dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 2,80(dua koma delapan). Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I sebesar **102,86%**.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penyebab kecenderungan kenaikan kinerja pada triwulan I tahun 2023, sebagai berikut:

- Penggunaan absensi apel dan kegiatan melalui email corporate
- Akses BOC dan Login BOC: Pada TW I akses dan login BOC dilaksanakan secara rutin dan berkala sehingga indeks pemanfaatan meningkat
- Berita Aktual: Pada TW I ada kecenderungan peningkatan jumlah viewer berita aktual, dengan jumlah berita yang diunggah cukup banyak yaitu 13 berita. Peran penting tim media sosial untuk pemanfaatan subsite bandung.pom.go.id serta sosialisasi serta informasi di media sosial masih perlu terus ditingkatkan untuk lebih optimalnya akses subsite tersebut.



- SPIMKER dan SIPT: Secara umum untuk SPIMKER dan SIPT telah dilaksanakan dengan baik pada TW I; Untuk SPIMKER pemanfaatan cukup tinggi.

Tindak lanjut yang telah dilakukan:

- Pemanfaatan email: Sosialisasi berkala pemanfaatan email kepada seluruh pegawai melalui Nota Dinas; Integrasi Lembar Potongan Gaji yang dikirimkan melalui email; Koneksi aplikasi internal dengan akun email corporate seluruh pegawai; serta akses wajib aplikasi mySAPK menggunakan email corporate
- Akses BOC dan Login BOC: Tertib administrasi akses dan login BOC, serta update data secara berkala sesuai oleh PIC tim TIK
- Sosialisasi Shared Folder, akses Berita Aktual oleh seluruh pegawai ditingkatkan.

E. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA SEBELUMNYA

- Peningkatan koordinasi dengan PUSDATIN untuk optimalisasi SIPT serta peningkatan komunikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Bandung untuk optimalisasi email corporate semakin ditingkatkan dengan monitoring perbulan.
- Peningkatan monitoring terhadap akses dan pemanfaatan koneksi BOC dan shared folder oleh penanggungjawab TIK dilaksanakan perbulan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



**SASARAN
KEGIATAN
KE-11**

**TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG
SECARA AKUNTABEL**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran tersebut sebesar **219,75%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.44.

TABEL 3.44
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-11
TRIWULAN I TAHUN 2023

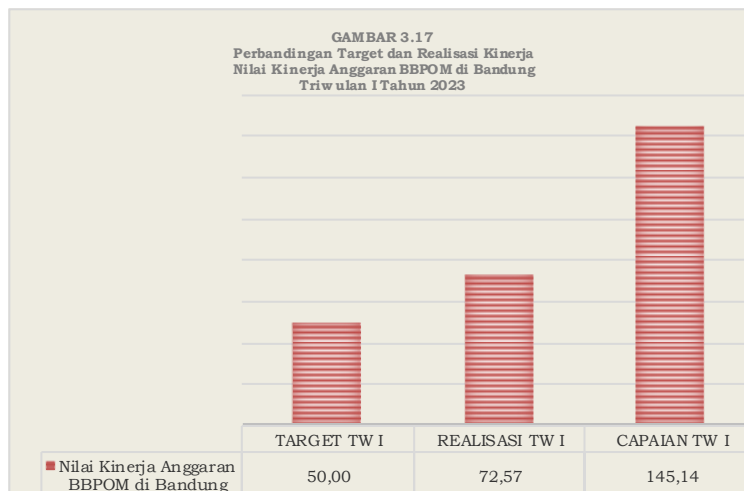
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	50,00	72,57	145,14	Tidak Dapat Disimpulkan	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			145,14	Tidak Dapat Disimpulkan	

NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: (1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Pengelolaan UP; (4) Rekon LPJ Bendahara; (5) Data Kontrak; (6) Penyelesaian Tagihan; (7) Penyerapan Anggaran; (8) Retur SP2D; (9) Perencanaan Kas (Renkas); (10) Pengembalian/Kesalahan SPM; (11) Dispensasi Penyampaian SPM; (12) Pagu Minus; dan (13) Konfirmasi Capaian Output.

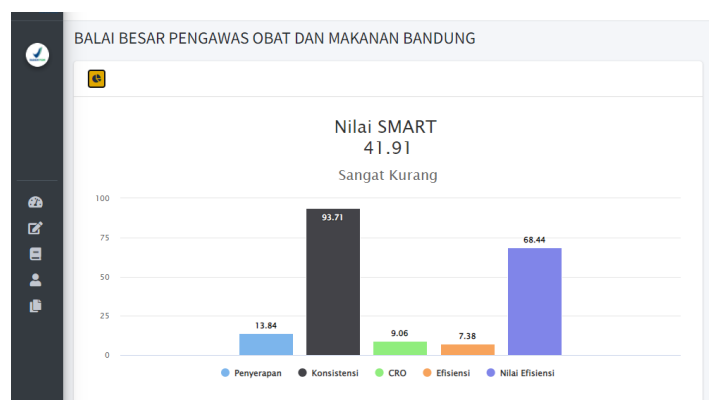


A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



Pada triwulan I tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 50. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung triwulan I tahun 2023 sebesar 72,57, dengan rincian, nilai EKA sebesar 72,57 dan nilai IKPA

sebesar 72,57. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **145,14*** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.



GAMBAR 3.15
“NILAI EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA) BBPOM DI BANDUNG”
TRIWULAN I TAHUN 2024

TABEL 3.45
“NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
BBPOM DI BANDUNG”
TRIWULAN I TAHUN 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	095	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	Nilai	100.00	100.00	72.96	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	45.00	70%	64.29
				Bobot	0	10	0	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5.00	0.00			
				Nilai Aspek	100.00				100.00			0.00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen PerbendahraPER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I DENGAN TARGET TAHUN 2023

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 95,60. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan 1 (75,91%).

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebahagiaan pencapaian kinerja disebabkan antara lain oleh:

- Serapan anggaran BBPOM di Bandung pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp.11.714.438.459,- terhadap pagu tahun anggaran 2023 sebesar Rp.75.260.350.000,- (15,56%).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap rincian output dan sasaran kegiatan setiap bulan.
- Percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dengan melakukan perubahan metode pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya secara luring menjadi daring atau hybrid. Serta percepatan pengadaan barang dan jasa yang sudah dimulai pada Bulan Januari 2023.
- Peningkatan kinerja pengelolaan APBN pada satker BBPOM di Bandung, antara lain: penyampaian laporan capaian output tepat waktu, pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu, penyampaian data kontrak dan LPJ Bendahara tepat waktu, penyelesaian tagihan tepat waktu.



E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut:

- Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dilakukan setiap triwulan yang dipimpin oleh plh. Kepala Balai Besar POM di Bandung yang dihadiri oleh Tim Manajemen Kinerja yang diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran serta merumuskan rencana tindaklanjut untuk kegiatan triwulan berikutnya.



Gambar 3.16

Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran

F. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

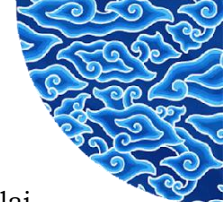
Rekomendasi untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung pada periode sebelumnya adalah:

- Melakukan langkah-langkah untuk memenuhi seluruh indikator pembentuk EKA dan IKPA.
- Menyusun *Plan of Action* (POA) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) tahun 2023 agar dapat mencapai target capaian kinerja sesuai dengan RAPK Tahun 2023 dan target serapan anggaran sesuai Surat Edaran Nomor: HK.02.02.2.21.04.21.11 tentang Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindaklanjut sebagai berikut:

- Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk memenuhi indikator pembentuk EKA dan IKPA antara lain: penyampaian laporan capaian output tepat waktu, pertanggungjawab UP dan TUP tepat waktu, penyampaian data kontrak dan LPJ Bendahara tepat waktu, penyelesaian tagihan tepat waktu.
- Telah dilakukan penyusunan Plan of Action (POA) Kegiatan berdasarkan DIPA dan POK Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD), dan pada triwulan I telah dilakukan Revisi Anggaran di Kanwil DJPB salah satunya melakukan revisi Halaman I DIPA.





- Percepatan proses pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 yang sudah dimulai pada awal tahun anggaran.
- Menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang diselenggarakan setiap bulan untuk menetapkan tindak lanjut yang dilakukan pada bulan berikutnya.
- Upaya percepatan penyampaian dokumen/pertanggungjawaban keuangan sesuai timeline yang telah ditetapkan.

Rekomendasi untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung pada periode selanjutnya adalah:

- Melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART DJA secara tepat waktu dengan data yang akurat.
- Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran.
- Memastikan penyerapan anggaran triwulan sesuai dengan target (15%-40%-60%-99%) dengan cara menyegerakan pencairan dan pelaksanaan kegiatan terutama belanja modal.
- Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.
- Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2023 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.
- Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan.
- Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
- Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.
- Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
- Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
- Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023, anggaran Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp. 75.260.350.000,- dengan rincian: (1) Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.251.694.000,-; dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.008.656.000,-. Pada triwulan I tahun 2023, realisasi anggaran sebesar Rp. 11.714.438.459,- (15.56%).

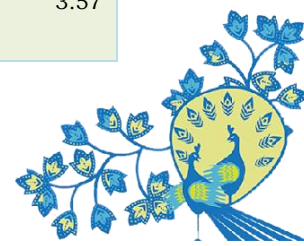
TABEL 3.46
REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2023

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Program Pengawasan Obat dan Makanan	45.251.694.000	28.016.269.715	61,91
Program Dukungan Manajemen	30.008.656.000	5.520.985.826	18,40
TOTAL	75.260.350.000	11.714.438.459	15,56

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan dan alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

TABEL 3.47
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,854,663,000,-	46,451,439,-	2.50
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	40,385,000,-	3,000,000,-	7.43
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	260,122,500,-	9,280,000,-	3.57
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	3,956,738,500,-	449,355,100,-	11.36
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10,938,724,000,-	389,976,378,-	3.57



NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	875,477,000,-	202,135,363,-	23.09
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,367,407,000,-	224,533,721,-	16.42
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	4,606,359,000,-	622,585,412,-	13.52
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	23,470,695,000,-	5,972,048,284,-	25.44
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	9,678,295,00,-	5,264,372,480,-	54.39
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	312,952,000,-	39,662,000,-	12.67
TOTAL		75.260.350.000	11.714.438.459	15,56

Penyerapan anggaran per sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2023 dari yang terbesar secara berurutan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Kegiatan Ketujuh yaitu: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1.430.363.000,- dan realisasi sebesar Rp. 428.163.000,- dengan capaian 30%.
- 2) Sasaran Kegiatan Kesembilan yaitu: Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal dengan pagu sebesar Rp. 23,470,695,000,- dan realisasi sebesar Rp. 5,972,048,284,-, dengan capaian 25.44%.
- 3) Sasaran Kegiatan Keenam yaitu: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 875,477,000,- dan realisasi sebesar Rp. 202,135,363,- dengan capaian 23.09%.
- 4) Sasaran Kegiatan Kedelapan yaitu: Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal dengan pagu sebesar Rp. 4,606,359,000,- dan realisasi sebesar Rp. 622,585,412,- dengan capaian 13.52%.
- 5) Sasaran Kegiatan Kesebelas yaitu: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel dengan pagu sebesar Rp. 312,952,000,- dan realisasi sebesar Rp. 39,662,000,- dengan capaian 12.67%.
- 6) Sasaran Kegiatan Keempat yaitu: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 3,956,738,500,- dan realisasi sebesar Rp. 449,355,100,- dengan capaian 11.36%.
- 7) Sasaran Kegiatan Kedua yaitu: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung



dengan pagu sebesar Rp. 40,385,000,- dan realisasi sebesar Rp. 3,000,000,- dengan capaian 7.43%.

- 8) Sasaran Kegiatan Ketiga yaitu: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 260,122,500,- dan realisasi sebesar Rp. 9,280,000,-, dengan capaian 3.57%.
- 9) Sasaran Kegiatan Kelima yaitu: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 10,938,724,000,- dan realisasi sebesar Rp. 389,976,378,- dengan capaian 3.57%.
- 10) Sasaran Kegiatan Kesatu yaitu: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1,854,663,000,- dan realisasi sebesar Rp. 46,451,439,-, dengan capaian 2.50%.

Sedangkan jika dilihat penyerapan anggaran berdasarkan *perspective balance score card* maka secara berturut-turut dari yang tertinggi adalah sebagai berikut:

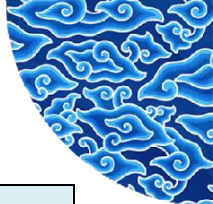
- 1) *Learning and Growth Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.068.301.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.898.668.176,- dengan capaian 31.26%.
- 2) *Internal Process Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.138.346.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1.266.000.562,- dengan capaian 7.39%.
- 3) *Stakeholders Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.155.170.500,- dan realisasi sebesar Rp. 58.731.439,- dengan capaian 2.73%.

TABEL 3.48
 REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN
 PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD BALAI BESAR POM DI BANDUNG
 TRIWULAN I TAHUN 2023

Perspective	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan			Perspective		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,854,663,000,-	46,451,439,-	2.50	2.155.170.500,-	58.731.439,-	2.73
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	40,385,000,-	3,000,000,-	7.43			



LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TRIWULAN I TAHUN 2023



Perspective	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan			Perspective		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	260,122,500,-	9,280,000,-	3.57			
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	3,956,738,500,-	449,355,100,-	11.36	17.138.346.500,-	1.266.000.562,-	7.39
	5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10,938,724,000,-	389,976,378,-	3.57			
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	875,477,000,-	202,135,363,-	23.09			
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,367,407,000,-	224,533,721,-	16.42			
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	4,606,359,000,-	622,585,412,-	13.52	38.068.301.000,-	11.898.668.176,-	31.26
	9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	23,470,695,000,-	5,972,048,284,-	25.44			
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	9,678,295,00,-	5,264,372,480,-	54.39			
	11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	312,952,000,-	39,662,000,-	12.67			
NILAI PENCAPAIAN ANGGARAN			57.361.818.000,-	13.237.511.413,-	23.08	57.361.818.000,-	13.237.511.413,-	23.08

Pada triwulan I, RPD yang tercantum dalam Halaman III DIPA BBPOM di Bandung sebesar Rp. 7.055.499.000,-, maka deviasi sebesar -87.62 dengan kategori Baik (Hijau). Secara rinci dijelaskan tabel berikut :



TABEL 3.49
HASIL PERHITUNGAN DEVIASI RPD
TRIWULAN I TAHUN 2023

BULAN	% RPD Halaman III DIPA	% Realisasi	Deviasi	Kategori
JANUARI	1.78	4.18	-134.79	BAIK
FEBRUARI	6.63	17.50	-163.99	BAIK
MARET	12.30	23.08	-87.62	BAIK

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : HK.02.02.2.21.04.21.11 tentang Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021 bahwa target RPD per triwulan, mengacu pada target penyerapan anggaran per triwulan:

- Triwulan I, sebesar minimal 15 persen;
- Triwulan II, sebesar minimal 40 persen;
- Triwulan III, sebesar minimal 60 persen; dan
- Triwulan IV, sebesar minimal 99 persen.

TABEL 3.50
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I TAHUN 2023

Target Realisasi Anggaran TW I	Realisasi Anggaran Triwulan I	Capaian
15,00%	23,08%	153,87%

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:



$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien

Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

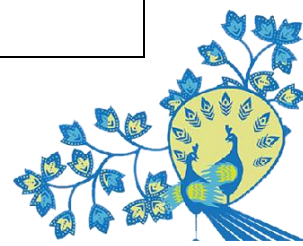
$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

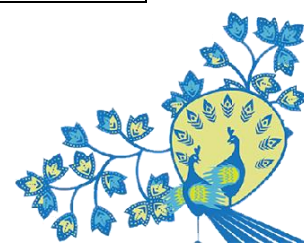
Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.51
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		B	c	d=b/c	e=d-1	f
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.96	0.00			
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	98.29	3,24	30.34	29.34	EFISIEN
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80.91	0.00			



Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		B	c	d=b/c	e=d-1	f
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	119.04	3.24	36.76	35.76	EFISIEN
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	101.31	48.22	2.10	1.10	EFISIEN
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu		7.43			
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		0.00			
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		30.21			
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung		0.00			
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	103.09	17.98	5.73	4.73	EFISIEN
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	109.77	2.22	49.42	48.42	EFISIEN
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	74.20	13.81	5.37	4.37	EFISIEN
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	92.98	15.17	6.13	5.13	EFISIEN
14	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	104.92	12.33	8.51	7.51	EFISIEN
15	Indeks Pelayanan Publik		0.00			
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	55.57	7.01	7.93	6.93	EFISIEN
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	98.06	2.13	45.93	44.93	EFISIEN
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	79.00	9.93	7.96	6.96	EFISIEN
19	Jumlah desa pangan aman	75.00	4.08	18.36	17.36	EFISIEN
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	62.50	18.00	3.47	2.47	EFISIEN
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	170.90	22.31	7.66	6.66	EFISIEN
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	209.10	25.65	8.15	7.15	EFISIEN



Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		B	c	d=b/c	e=d-1	f
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75.82	16.42	4.62	3.62	EFISIEN
24	Indeks RB UPT		13.75			
25	Nilai AKIP UPT		0.00			
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT		25.44			
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		54.90			
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	80.89	41.65	1.94	0.94	EFISIEN
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	214.60	12.67	16.93	15.93	EFISIEN
TOTAL		72.31	23.08	3.13	2.13	EFISIEN

Pada triwulan I tahun 2023, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator secara kumulatif masuk kedalam kategori **Efisien (2.13)**.

Sedangkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan pada triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.52
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN KEGIATAN/OUTPUT
TRIWULAN I TAHUN 2023

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2023	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
1	3165.AEA.001 – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Laporan	14	3	21.40	420.383.000	309.868.000	73,71
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Keputusan	1958	521	26.60	1.319.067.000	353.935.000	26,83
3	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	UMKM	32	Progress 16%	16.00	130.548.000	1.520.000	1,16
4	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Laporan	1	Progress 25%	25.00	1.204.413.000	464.433.200	38,56

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2023	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
5	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Layanan	45	9	20.00	170.167.000	9.884.000	5,81
6	3165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Paket	1	0	0	223.000.000	32.290.000	14,48
7	3165.CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Unit	1	Progress 17%	17.00	1.580.000.000	0	0.00
8	3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	Unit	1	Progress 36,77%	36,77	75.400.000	0	0,00
9	3165.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	Progress 25%	25.00	300.000.000	75.518.311	25,17
10	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Laboratorium	1	Progress 15.06%	15.06	2.810.300.000	272.254.602	9,69
11	3165.QCD.U02 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	Perkara	10	1	10.00	1.009.980.000	118.295.000	11,71
12	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Lembaga	112	Progress 20%	20.00	1.005.602.000	41.031.000	4,08
13	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	Lembaga	37	Progress 10.00%	10.00	1.149.720.000	0	0,00
14	3165.QDB.003 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Lembaga	18	Progress 20%	20.00	348.351.000	4.700.000	1,35
15	3165.QDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Orang	81.107	11.351	13,99	23.291.520.000	3.767.983.339	16,18
16	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Sampel	957	217	22,67	834.085.000	43.102.382	5,17
17	3165.QIA.005 Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	Sampel	2548	546	21,43	1.646.589.000	137.118.599	8,33
18	3165.QIA.008 Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	Sampel	125	70	56,00	71.982.000	6.228.000	8,65
19	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan	Sarana	384	116	30,21	876.819.000	203.371.200	23,19

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2023	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
	yang Diperiksa oleh UPT							
20	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Sarana	1.431	350	24,00	1.674.428.000	351.920.000	21,02
21	3165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Laboratorium	1	Progress 53,33%	53,33	6.689.340.000	0	0,00
22	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	Progress 26%	26,00	30.008.656.000	5.520.985.826	18,40
TOTAL						75.260.350.000	11.714.438.459	15,56%

Pada triwulan I tahun 2023, BBPOM di Bandung melaksanakan 22 (dua puluh dua) Rincian Output (RO) dengan nilai TE masuk kategori Efisien. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (TE=4,74). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada triwulan I terlaksana secara efisien (TE=0.64).

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.



LAPORAN INTERIM TRIWULAN 1 TAHUN 2023

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 SARAN

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2023 mengukur pencapaian kinerja triwulan I tahun 2023 berdasarkan target pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2022 berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2023, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI, empat (4) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, satu (1) pencapaian sasaran kegiatan tidak dapat disimpulkan, serta empat (4) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada akhir tahun. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 105 % dengan kriteria memenuhi kriteria, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua dan ketiga belum dilakukan pengukuran, pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun, sehingga belum dapat menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan serta meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 96,63% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan Balai Besar POM di Bandung perlu meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik.



- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kelima sebesar 100,03% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan berhasilnya upaya Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan.
- ☪ Capaian kinerja sasaran strategis keenam sebesar 91,33% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan belum berhasilnya Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan, namun perlu dilakukan strategi praktis untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh sebesar 98,93% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan belum berhasilnya upaya Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan dan kesembilan belum dilakukan pengukuran, pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun sehingga belum dapat menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal serta mewujudkan SDM UPT yang berkinerja optimal.
 - ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesepuluh sebesar 102,86% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
 - ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesebelas sebesar 145,14% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung mengelola keuangan secara akuntabel, namun perlu dilakukan review terhadap target yang telah ditetapkan.
3. Pada triwulan I tahun 2023, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) didapatkan hasil sebesar Efisiensi (TE = 2,13).

4.2 SARAN

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2023 merupakan dasar untuk menetapkan strategi dan inovasi pada periode selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung, antara lain :

1. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2018 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Menjalinkan kerjasama dengan *stake holder* terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima.
4. Melakukan penyesuaian dalam metode pengawasan pre market, post market dan penyidikan yaitu dengan menggunakan teknologi dan melakukan inovasi berbasis teknologi.
5. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terus menerus serta berkesinambungan.